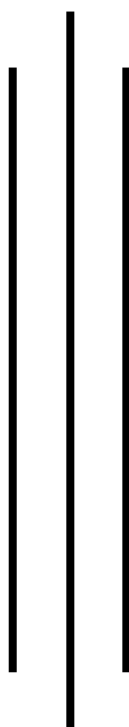




PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2019-2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
2022**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah jangka menengah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pasal 15 disebutkan Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah. Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi yang berpedomann pada dokumen perencanaan daerah maupun dokumen terkait lainnya.

Renstra Perangkat Daerah berfungsi untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Bupati yang tertuang dalam P-RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas pembanguan daerah serta tolok ukur pencapaiannya. Renstra dapat membantu dalam mengungkapkan tujuan dan mengidentifikasi langkah-langkah menuju tercapainya tujuan tersebut, serta menciptakan fokus dan kemampuan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal.

P-RPJMD Kabupaten Sampang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Program Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024, telah diadakan perubahan yang disebabkan oleh :

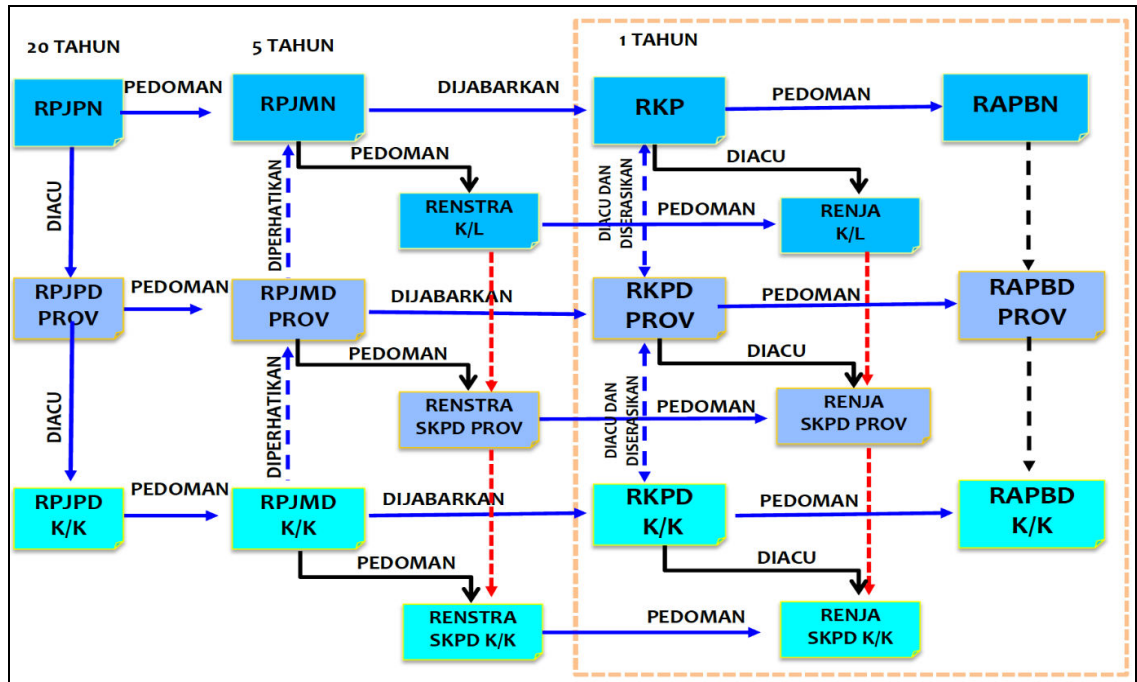
1. Dampak pandemi COVID-19 yang merubah tatanan social dan perekonomian yang mengakibatkan perubahan target makro ekonomi serta pendanaan pembangunan, sehingga perlu adanya penyesuaian target capaian pembangunan

serta kebijakan pembangunan daerah yang selaras dengan kebijakan pembangunan Nasional;

2. Hasil evaluasi Renja PD mengakibatkan terjadi perubahan kegiatan, lokasi, dan/atau indikator;
3. Terdapat kebijakan Nasional Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
4. Adanya penyesuaian terhadap Pohon Kinerja (POKIN) perangkat daerah

Sesuai ketentuan peraturan-perundangan pelaksanaan P-RPJMD disusun secara simultan dengan perubahan Renstra PD, hal ini dikarenakan sasaran Renstra Perangkat Daerah merupakan pendorong tercapainya target sasaran RPJMD serta program RPJMD bersumber dari program pada Renstra Perangkat Daerah. Renstra Bappeda Litbang Tahun 2019 – 2024 yang mempedomani pada RPJMD Kabupaten Sampang juga perlu diadakan perubahan menyesuaikan dengan perubahan kebijakan pembangunan daerah serta kemampuan pendanaan pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam P-RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019 – 2024.

Tahapan penyusunan Perubahan Renstra PD telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang meliputi: (1) Persiapan Penyusunan; (2) Penyusunan Rancangan Awal; (3) Penyusunan Rancangan; (4) Penyusunan Rancangan Akhir; dan (5) penetapan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Selain memperhatikan tahapan dan proses penyusunannya, dokumen Renstra PD juga harus mengacu dan berpedoman pada RPJMD, Renstra PD Provinsi dan Renstra K/L. Hal ini dilaksanakan supaya dokumen Renstra PD selaras dan konsisten dengan perencanaan di daerah, propinsi, dan pusat. Untuk melihat keterkaitan dokumen tersebut dapat dilihat dari bagan di bawah ini:



Gambar 1.1
Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan Pusat Dan Daerah

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Renstra Bappeda Litbang Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sampang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2006 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 2); dan
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 adalah untuk melakukan penyesuaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang koordinatif, sinergi, dan akuntabel.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Sampang 2019-2024 adalah untuk:

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang Kabupaten Sampang dalam mendukung Visi dan Misi pembangunan;
2. Menyediakan dokumen acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Litbang; dan

3. Tersedianya dokumen yang digunakan sebagai pedoman dan tolok ukur pengendalian dan evaluasi kinerja yang akan dilaksanakan oleh Bappeda Litbang dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Litbang
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

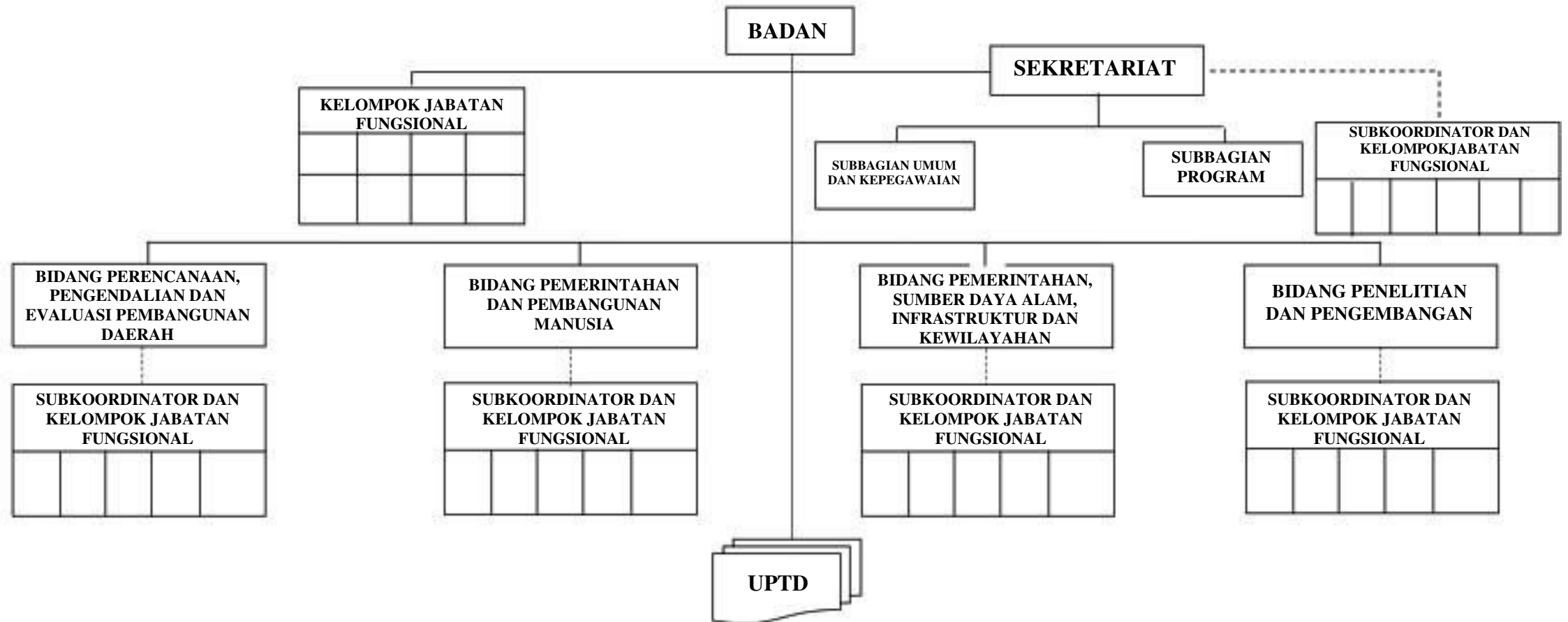
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan dalam Permendagri 86 Tahun 2017, Perencanaan pembangunan daerah didefinisikan sebagai Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip - prinsip, a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional; b. dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing; c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sampang merupakan Perangkat Daerah yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan akuntabel sehingga tujuan-tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya dapat tercapai.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Perbup No. 129 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sampang (Bappelitbangda), struktur organisasi Bappelitbangda Kabupaten Sampang sesuai dengan Keputusan tersebut dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2022

Gambar 2.1
Susunan Organisasi Bappelitbangda Kabupaten Sampang

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan daerah Daerah (Bappelitbangda) merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bappelitbangda memiliki kedudukan dan struktur organisasi:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
2. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten;
3. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan serta tugas pembantuan; dan
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
 - b. penyusun kebijakan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan
 - c. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
 - d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan;
 - e. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri atas:

1. Adapun Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri atas :
 - a. Kepala Badan

- b. Sekretariat, membawahi :
 - Sub Bagian Program;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. UPTD Badan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
 3. Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan; dan
 4. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Tugas Dan Fungsi

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit kerja yang meliputi program dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta keuangan, Sekretariat mempunyai fungsi :

- Pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- Pengelolaan administrasi keuangan;
- Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
- Pembinaan organisasi dan tatalaksana badan;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya

aparatur;

- Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
- Pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (“*maintenance*”);
- Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah;
- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala badan; dan
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana badan.

a. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas :

- Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, penggandaan naskah-naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- Melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- Melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat;
- Menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- Melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
- Membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non yudisial);
- Menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
- Menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (*maintenance*); dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

b. **Sub Bagian Program**, mempunyai tugas :

- Menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
- Melaksanakan pengolahan data;
- Melaksanakan perencanaan program;
- Menghimpun data, menyusun rencana strategis badan dan evaluasinya;
- Menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran, rencana kerja dan evaluasinya;
- Menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dan kebijakan;
- Menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan pelaporan;
- Menyusun laporan capaian program kegiatan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

2. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:

- Penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- Pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan perencanaan pembangunan daerah;
- Pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan Perangkat Daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- Pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

3. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, laporan hasil pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi lingkup

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Dalam hal melaksanakan tugasnya, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:

- Penyusunan bahan rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dan rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan perangkat daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pengelolaan data dan informasi pembangunan sektoral sebagai bahan penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi, swasta dan desa lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pembinaan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pengelolaan data dan informasi kepada perangkat daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

4. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah. Dalam hal melaksanakan tugasnya, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- Penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD), dokumen rencana perangkat daerah (Renstra dan Renja) dan merumuskan bahan rencana pendanaan pembangunan non APBD Kabupaten Sampang;
- Pengintegrasian, harmonisasi dan sinergitas kegiatan perangkat daerah, provinsi, kementerian/lembaga, unsur masyarakat, akademisi dan swasta;
- Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi perangkat daerah, serta pengendalian dan evaluasi pendanaan non APBD Kabupaten Sampang;

- Penyajian data dan informasi perencanaan pembangunan daerah serta pengendalian sistem data dan informasi pembangunan daerah;
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

5. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah;
- Penyusunan bahan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- Merencanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan serta sistem ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengabdian kepada masyarakat yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- Penyebarluasan informasi hasil penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan.

6. Unit Pelaksana Teknis

- UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan; dan

- Pembentukan UPTD dapat dilakukan dengan mempertimbangkan peningkatan pelayanan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai tugas Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Personel Bappelitbangda Kabupaten Sampang terdiri dari sejumlah pegawai yang masing-masing mengisi jabatan struktural dan fungsional umum sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Secara terinci, kondisi pegawai di Bappelitbangda Kabupaten Sampang menunjukkan data sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin
(Posisi Per 31 Desember 2022)

No	Jenis Kelamin	Jumlah (org)
1	Laki – Laki	15
2	Perempuan	12
	Jumlah	27

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2022

Jumlah personel Laki-laki 55,56% dan jumlah personel perempuan 44,44%. Hal ini menunjukkan pegawai Bappelitbangda didominasi oleh laki-laki.

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
(Posisi Per 1 Maret 2022)

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (org)
1	Pasca Sarjana (S2)	19
2	Sarjana (S1)	7
3	Diploma	-
4	SLTA	1
5	SLTP	
6	SD	
	Jumlah	27

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2022

Sebesar 70,37% pegawai Bappelitbangda merupakan lulusan pasca sarjana (S2), 25,93% lulusan Sarjana (S1), dan 3,70% lulusan SLTA. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa lebih dari setengah pegawai Bappelitbangda merupakan lulusan pasca sarjana. Tentunya kondisi personel tersebut merupakan potensi SDM dalam menjalankan tupoksi sesuai bidang dan mendukung dalam pelayanan.

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Menurut Pangkat / Golongan Ruang
(Posisi Per 1 Maret 2022)

No	Golongan	Jumlah (org)
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
2	Pembina Tk I (IV/b)	-
3	Pembina (IV/a)	10
4	Penata Tk I (III/d)	3
	Penata (III/c)	8
	Penata Muda Tk. I (III/b)	2
	Penata Muda (III/a)	2
	Jumlah	26
4	Pengatur Tk. I (II/d)	1
	Pengatur (II/c)	
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	
	Pengatur Muda (II/a)	
	Jumlah	1
5	Juru Tingkat I (I/d)	-
	Juru (I/c)	-
	Juru Muda Tingkat I (I/b)	-
	Juru Muda (I/a)	-
	Jumlah	
6	CPNS	
	Penata Muda (III/a)	-
	Pengatur (II/c)	
	Jumlah	-
7	PTT	-
	Jumlah	-
	Jumlah Keseluruhan	27

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2019

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pegawai terbanyak adalah Pembina (IV/a) yaitu 10 orang atau sebesar 37,08%.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Bappelitbangda Kabupaten Sampang telah

dilengkapi sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk prasarana gedung telah disediakan gedung yang cukup memadai untuk menampung pelaksanaan tugas.

Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bappelitbangda Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Daftar Sarana dan Prasarana Bappelitbangda Kabupaten Sampang
(Per 1 Desember 2022)

No.	Jenis Sarana/Prasarana	Satuan	Jumlah/Keterangan		
			Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	Bangunan gedung kantor	unit	1		
2	Tanah Bangunan Utk Kantor	unit	2		
3	Meubelair	unit	239	6	
4	Perlengkapan Kantor	unit	200		
5	Kendaraan Dinas Operasional	unit	28		
	Roda 4	unit	3		
	Roda 2	unit	20		
6	Komputer PC / Laptop	unit	45		
	Komputer PC	unit	13		
	Laptop	unit	32		
	Perlengkapan Komputer	unit	37		
7	Peralatan Kantor	unit	278		
8	Alat-alat Studio	unit	15		

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2022

Sarana dan prasarana diatas tentunya dimanfaatkan secara optimal demi mendukung kinerja pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Sampang. Diharapkan untuk lima tahun ke depan sarana prasarana yang rusak sudah tidak ada lagi demi stabilitas kinerja pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Sampang.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan tahapan untuk melihat capaian kinerja instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran. Sebagai bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pengukuran kinerja merupakan tahapan penting untuk membandingkan antara target dalam penetapan kinerja dengan hasil yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja yang dituangkan ke dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disusun untuk mengukur capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang memberikan informasi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan mengukur capaian atas sasaran strategis yang telah diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja dengan indikator-indikator kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses mencatat, dan mengukur pencapaian sasaran, melalui hasil-hasil ataupun proses pelaksanaan suatu kegiatan. Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam proses pengukuran kinerja menitikberatkan pada upaya pencapaian hasil kerja atau outcome, tidak hanya pada penggunaan sumber dana. Indikator kinerja outcome adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka tertentu.

Suatu Perangkat Daerah dikatakan berhasil dalam pencapaian sasaran strategis dilihat dari prosentase nilai tingkat pencapaian indikator kinerjanya. Disamping itu, untuk mengetahui seberapa besar tingkat capaian kinerja. dalam satu tahun anggaran dilakukan dengan membandingkan kinerja pada tahun – tahun sebelumnya. Adapun Kriteria Penilaian Capaian Kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

No	Nilai Capaian Kinerja	
	Interval Penilaian	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91 ≤ 100	Sangat Tinggi
2.	76 ≤ 90	Tinggi
3.	66 ≤ 75	Sedang
4.	51 ≤ 65	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2022

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

NO.	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	Target NSPK	Target IKK	Target Ind. Lain	TARGET						REALISASI						CAPAIAN					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan yang berkualitas			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				100	100	100			
a.	Persentase Perangkat Daerah dengan Kualitas Dokumen Perencanaan Baik			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				100	100	100			
b.	Persentase capaian indikator kinerja sasaran dalam RPJMD ≥80%			100	45	55	65	75	91,67	95	100	100	100				100	100	100			
c.	Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yg dijadikan dasar pembangunan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				100	100	100			
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA		Ada/tidak		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Perda No. 7 Tahun 2006 tentang RPJPD Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025						Perda No. 7 Tahun 2006 tentang RPJPD Kabupaten Sampang Tahun 2005-2025					
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA		Ada/tidak		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada				Ada	Ada	Ada			
4	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA		Ada/tidak		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada				Ada	Ada	Ada			
5	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA		Ada/tidak		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Perda No. 7 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032						Perda No. 7 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032					
6	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100				100	100	100			
7	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100				100	100	100			
8	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW		100		100	100	100	100	100	100	100	100	100				100	100	100			

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2018 indikator sasaran “Persentase capaian indikator kinerja sasaran dalam RPJMD $\geq 80\%$ ” tidak tercapai 100%. Capaian indikator tersebut adalah 84,79%, capaian Indikator sasaran RPJMD $\geq 80\%$ sebanyak 29 indikator dari 36 Indikator sasaran. Namun secara total rata-rata capaian keseluruhan indikator sasaran Renstra Bappelitbangda Tahun 2013-2018 adalah 99,37 atau sangat baik.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Pelayan Bappelitbangda Kabupaten Sampang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran						Rata-rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(11)	(12)	(13)	(14)	(18)	(19)	(15)	(16)
Belanja Tidak Langsung	3.403.383.590	3.223.816.940					2.898.099.848	2.330.859.227					85,15	72,30					-0,05	-19,57
Belanja Langsung	11.475.555.750	7.846.621.352	7.379.995.295	9.062.856.325	9.969.141.957	10.916.056.154	10.459.798.067	5.243.356.701	-	-	-	-	91,15	66,82					-0,32	-49,87
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.326.640.000						1.240.198.475						93,48							
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	1.015.680.000						909.934.250						89,59							
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah	1.631.700.000						1.551.079.294						95,06							
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan	793.240.000						762.156.536						96,08							
Program Pengembangan Data, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	1.626.570.000						1.564.778.634						96,20							
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi		2.011.033.215	1.291.035.000	2.387.812.693	2.500.000.000	2.700.000.000		2.257.248.042												
Pengelolaan Data dan Informasi		322.669.390	400.000.000	360.000.000	365.000.000	370.000.000		572.171.247						177,32						
Penyusunan Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan		699.713.825	401.035.000	862.812.693	905.000.000	685.000.000		772.174.431						110,36						
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		889.993.435	1.000.000.000	1.200.000.000	1.350.000.000	1.500.000.000		404.188.108						45,41						
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan		1.847.224.500	1.875.000.000	2.000.000.000	2.250.000.000	2.400.000.000		940.647.952						50,92						

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																						
Program Penelitian dan Pengembangan	3.125.665.500	1.171.925.500	1.191.193.357	1.250.000.000	1.421.593.962	1.623.753.359	2.765.637.725	490.537.238					88,48	41,86						-0,63	-82,26	
URUSAN PERENCANAAN																						
Program Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	669.360.250	649.299.948	681.764.946	749.941.440	824.935.584	907.429.143	597.475.913	598.564.539					89,26	92,19							-0,03	0,18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	569.900.000	565.514.452	593.790.175	653.169.193	718.486.112	790.334.723	486.777.400	205.186.301					85,41	36,28							-0,01	-57,85
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	101.900.000	101.115.850	106.171.642	116.788.806	128.467.687	141.314.456	50.127.790	121.250.000					49,19	119,91							-0,01	141,88
Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Infomasi Publik	45.000.000	45.000.000	47.250.000	51.975.000	57.172.500	62.889.750	44.854.650	20.548.220					99,68	45,66							0,00	-54,19

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2022

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan Target Belanja Tidak Langsung (BTL) dari Tahun 2013-2018 sebesar -0,05 persen, sedangkan realisasinya bertumbuh dengan rata-rata -19,57 persen. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah personel, besaran gaji dan tunjangan ASN Bappelitbangda.

Belanja Langsung (BL) merupakan jumlah total dari anggaran Program/Kegiatan Bappelitbangda yang dialokasikan dari Tahun 2019-2024. Rata-rata pertumbuhan target Belanja Langsung sebesar -0,32 persen dan realisasinya sebesar -49,87 persen. Pertumbuhan anggaran dan realisasi Belanja Langsung tahun 2019-2020 mengalami penurunan/negatif. Hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional pada tahun 2020 sehingga dilakukan perubahan anggaran (*refocussing*) beberapa kali dalam rangka penanggulangan dan percepatan pemulihan dampak pandemi Covid-19..

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergisitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten terhadap sasaran Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan selaras dengan tugas dan fungsi :

Tabel 2.8
Komparasi Capaian Sasaran Renstra Bappelitbangda
Kabupaten Sampang sampai dengan Tahun 2021 terhadap
Sasaran Renstra Bappeda Provinsi dan Renstra Kementerian PPN / Bappenas

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian	Sasaran pada Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur	Sasaran pada Renstra Kementerian PPN / Bappenas
1	2	3	4	5
1	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan yang berkualitas	100,00	1. SDM Perencana yang berkualitas dan profesional Mekanisme 2. perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif 3. Perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel
a.	Persentase Perangkat Daerah dengan Kualitas Dokumen Perencanaan Baik	100,00		
b.	Persentase capaian indikator kinerja sasaran dalam RPJMD ≥80%	100		
c.	Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yg dijadikan dasar pembangunan	100,00		
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/tidak		
3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada/tidak		

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian	Sasaran pada Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur	Sasaran pada Renstra Kementerian PPN / Bappenas
1	2	3	4	5
4	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada/ tidak	waktu	
5	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada/ tidak		
6	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100,00		
7	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100,00		
8	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100,00		

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2022

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat keterkaitan antara renstra Bappelitbangda Kabupaten Sampang dengan Bappeda Propinsi Jawa Timur. Ini menunjukkan bahwa Renstra Bappelitbangda yang mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang selaras dengan Renstra Propinsi, sehingga perencanaan pembangunan baik propinsi dan daerah terpadu, selaras dan bersinergi.

2.4.1 Hasil telaahan terhadap RTRW

Menindaklanjuti amanat Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 9, yang menyatakan bahwa Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:

- a. holistik-tematik;
- b. integratif; dan
- c. spasial

dimana pendekatan spasial sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

RTRW sendiri merupakan rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.

Implementasi telaahan RTRW dalam dokumen Renstra adalah bertujuan mewujudkan pembangunan jangka menengah yang berorientasi pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Merujuk pada struktur ruang dan pola ruang sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-2032, pada kinerja pelayanan Bappelitbangda tidak

menimbulkan implikasi terhadap tugas dan fungsi pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan. Namun demikian dalam rangka mendukung penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas, diperlukan dokumen RTRW tersebut demi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada ruang.

2.4.2 Hasil Telaahan Terhadap KLHS

Maraknya isu degradasi lingkungan hidup, maka pada proses pelaksanaan pembangunan di berbagai daerah harus dapat memperhatikan aspek lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam penyusunan perencanaan maupun evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.” Dengan demikian penyusunan KLHS menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai bentuk implementasi dari amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup serta untuk memastikan agar pembangunan berkelanjutan dapat berjalan dengan baik dan mampu menjawab persoalan lingkungan.

Salah satu alat pengendalian yang digunakan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024, Bappelitbangda mendukung dalam pencapaian tujuan:

- a. Tujuan 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
- b. Tujuan 10 : Berkurangnya Kesenjangan
- c. Tujuan 11 : Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Tabel 2.9
Analisis Capaian Indikator TPB sesuai tugas dan fungsi pelayanan Bappelitbangda

No.	Indikator TPB (SDG's)	Capaian Existing		Target RPJMN2019	Gap Capaian 2017 dengan Target RPJMN 2019	Keterangan	Perangkat Daerah
		2019	2020				
Tujuan 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi							
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	5,33%	0,39%	Meningkat	-	Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional	BAPPELITBANGDA
8.1.1.(a)	PDRB per kapita.	17,99 juta	18,06 juta	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	-	Sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional	BAPPELITBANGDA
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDRB riil per orang bekerja per tahun.	n/a	n/a	Meningkat	-	Tidak tersedia data	BAPPELITBANGDA
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	n/a	n/a	Meningkat	-	Tidak tersedia data	BAPPELITBANGDA
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	n/a	n/a	Menurun (mendekat)	-	Tidak tersedia data	BAPPELITBANGDA
Tujuan 10 : Berkurangnya Kesenjangan							
10.1.1*	Koefisien Gini.	0,267	0,262	Menurun menjadi 0,005	-	Sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional	Bappelitbangda
Tujuan 11 : Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan							
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	n/a	n/a	Ada	-	Tidak tersedia data	Bappelitbangda

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2022

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Suatu permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dianggap memiliki nilai prioritas untuk dikerjakan apabila berhubungan dengan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya untuk mendukung pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Perangkat Daerah

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
1.	Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas belum optimal karena belum sinerginya hubungan antara dokumen perencanaan lainnya	Fungsi koordinasi perencanaan masih kurang optimal	Faktor Internal: Keterbatasan SDM pada Bappelitbangda dalam melaksanakan fungsi koordinasi perencanaan Faktor Eksternal: Kuranginya pemahaman SDM perencana Perangkat Daerah terkait dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan

No.	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
			Perangkat Daerah
2.	Belum tercapainya target pada indikator kinerja "Persentase capaian indikator kinerja sasaran dalam RPJMD $\geq 80\%$ " secara sempurna	Dari 36 indikator sasaran yang tertuang pada Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2020 terdapat 7 indikator yang nilai capaiannya $\geq 80\%$, sehingga nilai realisasi indikator "Persentase capaian indikator kinerja sasaran dalam RPJMD $\geq 80\%$ " sebesar 80,55 persen dari target 95,00 persen. Sedangkan capaiannya memiliki nilai 84,79 persen.	Faktor Internal: Kurangnya koordinasi dan pengendalian di lingkup bidang Bappelitbangda dalam rangka mengawal capaian indikator sasaran RPJMD secara periodik hal ini bertujuan supaya Perangkat Daerah mampu mengevaluasi kinerjanya sehingga mampu mencapai target kinerja sebagaimana telah ditentukan sebelumnya. Faktor Eksternal: Terdapat kendala teknis pada Perangkat Daerah masing-masing sehingga banyak indikator Perangkat Daerah belum berorientasi outcome.
3.	Persentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yg dijadikan dasar pembangunan 100% namun dalam implemetasi kurang optimal	Perangkat Daerah tidak konsisten terhadap mekanisme kajian	Faktor Internal: Pelibatan SDM dalam pembahasan kajian yang sering berganti tidak diantisipasi sedini mungkin Faktor Eksternal: Perangkat Daerah tidak konsisten dalam menuangkan hasil kajian dalam program kegiatan
4.	Kurang optimalnya pelaksanaan inovasi pada Perangkat Daerah	Inovasi belum dijadikan budaya kerja	Faktor Internal: SDM pelaksana inovasi kurang serius terhadap pelaksanaan inovasi OPD masing--masing dan masih bekerja berdasarkan budaya kerja lama Faktor Eksternal: Marketing branding tidak ditindak lanjuti dan banyak SDM tidak inovatif

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2022

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Bappelitbangda yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Adapun visi dan misi tersebut tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 sebagaimana berikut:



Gambar 3.1

Misi Pembangunan Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

Dari visi-misi diatas, tugas dan fungsi Bappelitbangda mendukung pada pencapaian misi 4 yaitu **“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”**. Program aksi yang tertuang dalam RPJMD terkait dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda yaitu Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah. Program aksi tersebut kelak akan dijabarkan dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Bappelitbangda yang dijabarkan pada Tabel 3.1 akan dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan.

Tabel 3.2
Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih serta Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Visi : “Sampang Hebat Bermartabat”				
No	Misi dan Program Aksi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	“Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang	1 Fungsi koordinasi perencanaan dan pengendalian masih kurang optimal	1 Kurangnya efektifnya fungsi koordinasi dalam hal perencanaan	1 Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang,

Visi : “Sampang Hebat Bermartabat”				
No	Misi dan Program Aksi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik”.</p> <p>Program Aksi: Optimalisasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan kinerja pemerintahan daerah</p>	<p>2 Belum tercapainya target pada indikator kinerja “Persentase capaian indikator kinerja sasaran dalam RPJMD $\geq 80\%$” secara sempurna</p> <p>3 Perangkat Daerah tidak konsisten terhadap mekanisme kajian</p> <p>4 Inovasi belum dijadikan budaya kerja</p>	<p>dan pengendalian di masing-masing lingkup Bidang Bappelitbangda</p> <p>2 Keterbatasan SDM pada Bappelitbangda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya</p>	<p>Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Bappelitbangda secara ideal</p> <p>2 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien</p> <p>3 Perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan</p> <p>4 Perkembangan teknologi dan informasi</p>

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2022

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Pada telaahan ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Bappenas dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur. Identifikasi faktor tersebut dapat disusun pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Sampang berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian PPN/Bappenas RI dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian PPN:	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Jawa Timur:	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel;	Sasaran Jangka Menengah Renstra Bappeprov Jawa Timur: 1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah 2 Mekanisme perencanaan yang transparan, partisipatif dan inovatif 3 Perencanaan dan Evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas serta tersedianya data/informasi perencanaan yang akurat dan tepat waktu	1. Fungsi koordinasi perencanaan dan pengendalian masih kurang optimal 2. Belum tercapainya target pada indikator kinerja "Persentase capaian indikator kinerja sasaran dalam RPJMD $\geq 80\%$ " secara sempurna	1 Kurangnya koordinasi dalam hal pengendalian dan perencanaan di masing-masing lingkup Bidang Bappelitbangda 2 Keterbatasan SDM pada Bappelitbangda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	1 Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Bappelitbangda secara ideal 2 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien 3 Perkembangan teknologi dan informasi
		Sasaran Jangka Menengah Renstra Balitbang Jawa Timur: Meningkatkan hasil litbang serta kajian yang implementatif dan dapat dimanfaatkan oleh stakeholders	3. Perangkat Daerah tidak konsisten terhadap mekanisme kajian 4. Inovasi belum dijadikan budaya kerja	Keterbatasan SDM Bidang Litbang	Perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2022

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Seperti yang dijelaskan pada Bab II, struktur ruang dan pola ruang sesuai Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang tidak menimbulkan implikasi terhadap tugas dan fungsi pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan. Namun demikian dalam rangka mendukung terwujudnya dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas, diperlukan dokumen RTRW demi pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada ruang

Sedangkan berdasarkan hasil kajian KLHS RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 terdapat rekomendasi terkait pelayanan Bappelitbangda yang harus ditindaklanjuti. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan OPD berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Hasil Rekomendasi KLHS terkait Tugas dan Fungsi Bappelitbangda	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penguatan/penegakan visi dan misi kepala daerah dalam kerangka pencapaian TPB;	1 Fungsi koordinasi perencanaan dan pengendalian masih kurang optimal	1 Kurangnya koordinasi dalam hal pengendalian dan perencanaan di masing-masing lingkup Bidang Bappelitbangda	Regulasi tentang KLHS
2.	Sinkronisasi kebijakan, rencana, dan program pembangunan Kabupaten Sampang yang berkelanjutan;	2 Belum tercapainya target pada indikator kinerja "Persentase capaian indikator kinerja sasaran dalam RPJMD $\geq 80\%$ " secara sempurna	2 Keterbatasan SDM pada Bappelitbangda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya	
3.	Evaluasi hasil capaian target (dan indikator) TPB secara berkala sehingga dapat membantu Pemerintah Kabupaten Sampang demi percepatan pemenuhan tujuan tersebut			

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2022

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari identifikasi permasalahan pelayanan dapat dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

- a. Pengendalian dan evaluasi yang optimal atas target-target kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan;
- b. Koordinasi perencanaan dan pengendalian di masing-masing lingkup Bidang Bappelitbangda yang efektif;
- c. Jumlah dan kapasitas SDM Bappelitbangda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai kebutuhan; dan
- d. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan.

Beberapa isu strategis tersebut dapat ditelaah lebih dalam dan dikaitkan pada isu pengarusutamaan gender. Hal tersebut perlu dilakukan untuk melakukan analisa lebih lanjut terhadap program dan kegiatan perangkat daerah. Analisis gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya. Dalam analisa gender ini juga dilakukan proses identifikasi masalah terutama mengenai isu gender yaitu suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan laki-laki dan perempuan atau ketimpangan gender, yaitu kesenjangan antara kondisi sebagaimana yang dicita-citakan dengan kondisi gender sebagaimana adanya.

Bappelitbangda Kabupaten Sampang setiap tahun melakukan analisa gender untuk menyusun Perencanaan Responsif Gender yang diharapkan dapat terjadi sinergi dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Dalam melakukan analisis gender Bappelitbangda Kabupaten Sampang menggunakan metode alur kerja analisis *Gender Analisis Pathway* (GAP). Hasil analisis gender tersebut dituangkan dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yaitu dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Bappelitbangda Kabupaten Sampang dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA Perangkat Daerah. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, dapat diidentifikasi bahwa isu gender dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan Bappelitbangda Kabupaten Sampang lebih umum pada kesenjangan kesempatan penerima manfaat antara pegawai laki-laki dan perempuan, namun tidak terlalu signifikan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017, tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut:

1. Diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi;
2. Untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan;
3. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah;
4. Dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan
5. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
2. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
3. Disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan
4. Memenuhi kriteria SMART-C.

Mengacu visi-misi Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, Bappelitbangda Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 4** serta mendukung pada pencapaian sasaran "**Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien**", sehingga penjabaran atas sasaran Perubahan RPJMD tersebut menjadi tujuan yang akan dicapai Bappelitbangda dalam kurun waktu 2019-2024. Adapun Tujuan dan Sasaran Perubahan Renstra Bappelitbangda Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Perubahan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR	Kondisi Awal Renstra (2018)	Realisasi/Target Kinerja						Kondisi Akhir Renstra (2024)
				2019 (Realisasi)	2020 (Realisasi)	2021 (Target)	2022 (Target)	2023 (Target)	2024 (Target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tujuan 1:									
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja yang Akuntabel	Nilai Perencanaan Kinerja Daerah	74,5	77,13	78,63	78,97	79	80	80	80
		Nilai Pengukuran Kinerja Daerah	63,84	67,16	68,56	69	70	71	72	72
	Sasaran 1:									
1	Terwujudnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan yang telah memenuhi standar	100	100	100	100	100	100	100	100
			Perubahan target kinerja			80	81	82	83	83
		Persentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran Renstra >80 %	n/a	100	100	100	100	100	100	100
			Perubahan target kinerja			80	81	82	83	83
	Sasaran 2:									
2	Terwujudnya Penelitian/Kajian dan Inovasi dalam mendukung Kebijakan Daerah	Persentase Penelitian/Kajian yang mendukung kebijakan Daerah	n/a	100	100	100	100	100	100	100
			Perubahan target kinerja			16,67	12,50	8,33	8,33	8,33
		Indeks Inovasi Daerah	0	860	2454	65*	70*	75*	80*	80*

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2022

Penetapan indikator kinerja Perangkat Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama diambil dari indikator sasaran strategic dimana IKU yang ditetapkan oleh Bappelitbangda adalah sebagai berikut:

1. Nilai Perencanaan Kinerja Daerah;
2. Nilai Pengukuran Kinerja Daerah; dan
3. Persentase Dokumen Perencanaan yang telah memenuhi standar
4. Persentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran RENSTRA $\geq 80\%$.
5. Persentase Penelitian/Kajian yang mendukung kebijakan Daerah
6. Indeks Inovasi Daerah

Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) mengalami perubahan berdasarkan penajaman hasil evaluasi SAKIP Bappelitbangda Tahun 2021 dan adanya penyesuaian pada Pohon Kinerja (POKIN) Tahun 2022 .

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Perubahan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja yang Akuntabel	Nilai Perencanaan Kinerja Daerah	Komponen Perencanaan Kinerja Dalam Penilaian SAKIP	LHE SAKIP	Bappelitbangda
		Nilai Pengukuran Kinerja Daerah	Komponen Pengukuran Kinerja Dalam Penilaian SAKIP	LHE SAKIP	Bappelitbangda
2	Terwujudnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan yang telah memenuhi standar	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang telah memenuhi standar sesuai kertas kerja Bappelitbangda		Bappelitbangda
		Persentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran RENSTRA $\geq 80\%$	Persentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran PD yang telah tercapai $\geq 80\%$		Bappelitbangda
3	Terwujudnya Penelitian/Kajian dan Inovasi dalam mendukung Kebijakan Daerah	Persentase Penelitian/Kajian yang mendukung kebijakan Daerah	Jumlah Kajian Penelitian dan Pengembangan yang dijadikan dasar pembangunan Jumlah OPD Yang Mengusulkan Kajian Penelitian		Bappelitbangda
		Indeks Inovasi Daerah	Himpunan Inovasi Daerah yang telah DILAPORKAN kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah .		Bappelitbangda

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penentuan strategi Perangkat Daerah didasarkan pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang sudah ditetapkan merupakan langkah awal dalam menyusun pilihan-pilihan strategi dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Strategi adalah langkah-langkah Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Tahap pertama perumusan strategi adalah menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan. Tahapan ini sudah di rumuskan pada bab sebelumnya. Strategi dan arah kebijakan Bappelitbangda haruslah relevan dan konsisten dengan strategi dan arah kebijakan yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Seperti telah dibahas pada bab sebelumnya Bappelitbangda Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 4** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien”**.

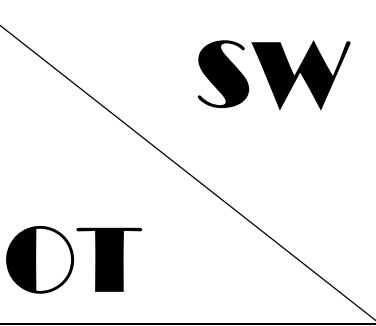
Tabel 5.1
Strategi dan Arah Kebijakan Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

MISI/TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA		STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
Misi 4: Memperkuat tata kelola pemerintahan dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik						
T.4	Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik	IT.8	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui percepatan reformasi birokrasi, dan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik dan bersih melalui penerapan sistem informasi dan teknologi (<i>e-government</i>) secara terpadu	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis IT melalui percepatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah dan desa yang baik	
S.17	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	IS.27	Opini BPK			BAPPELITBANGDA
		IS.28	Nilai SAKIP			

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2022

Tahap kedua adalah menyusun peta strategis dengan analisa SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Analisis SWOT merupakan analisis mengenai hal-hal pokok yang ada di lingkungan yang diasumsikan berpengaruh terhadap apa yang terjadi dan yang akan terjadi di lingkungan Bappelitbangda Kabupaten Sampang mencakup dua lingkungan pokok, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Dengan menggunakan analisis SWOT, diharapkan dapat mengungkapkan faktor internal dan faktor eksternal yang dianggap penting dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*), dan ancaman (*threat*).

Tabel 5.2
Analisis SWOT dalam Peta Strategi Bappelitbangda Kabupaten Sampang

	<p><u>Kekuatan / Strength</u></p> <p>Kebijakan pemerintah baik berupa Undang-undang, Peraturan menteri dan peraturan pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Bappelitbangda secara ideal</p>	<p><u>Kelemahan / Weakness</u></p> <p>1 Koordinasi dalam hal perencanaan dan litbang masih belum optimal 2 Keterbatasan SDM</p>
<p><u>Peluang / Opportunity</u></p> <p>1 Komitmen pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien 2 Perkembangan ilmu pengetahuan, penelitian dan pengembangan 3 Perkembangan teknologi dan informasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan baik dokumen perencanaan Daerah maupun Perangkat Daerah • Meningkatkan kualitas hasil litbang • Menerapkan Sistem Perencanaan dan Pengendalian berbasis spasial, teknologi dan informasi 	<p>Meningkatkan SDM bidang perencanaan dan litbang baik dari segi kuantitas dan kualitas</p>
<p><u>Ancaman /Threat</u></p> <p>Target-target kinerja pelayanan yang tertuang dalam indikator tujuan dan sasaran tidak tercapai:</p> <p>a. Persentase Perangkat Daerah dengan Kualitas Dokumen Perencanaan Baik b. Persentase Capaian Indikator kinerja Sasaran Renstra Perangkat Daerah $\geq 80\%$ c. Persentase Inovasi Daerah yang tervalidasi</p>	<p>Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan koordinasi dalam hal pengendalian dan perencanaan • Meningkatkan koordinasi bidang Litbang

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2022

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pada bab sebelumnya, maka Strategi dan Arah Kebijakan Bappelitbangda Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 dapat disajikan pada tabel berikut:

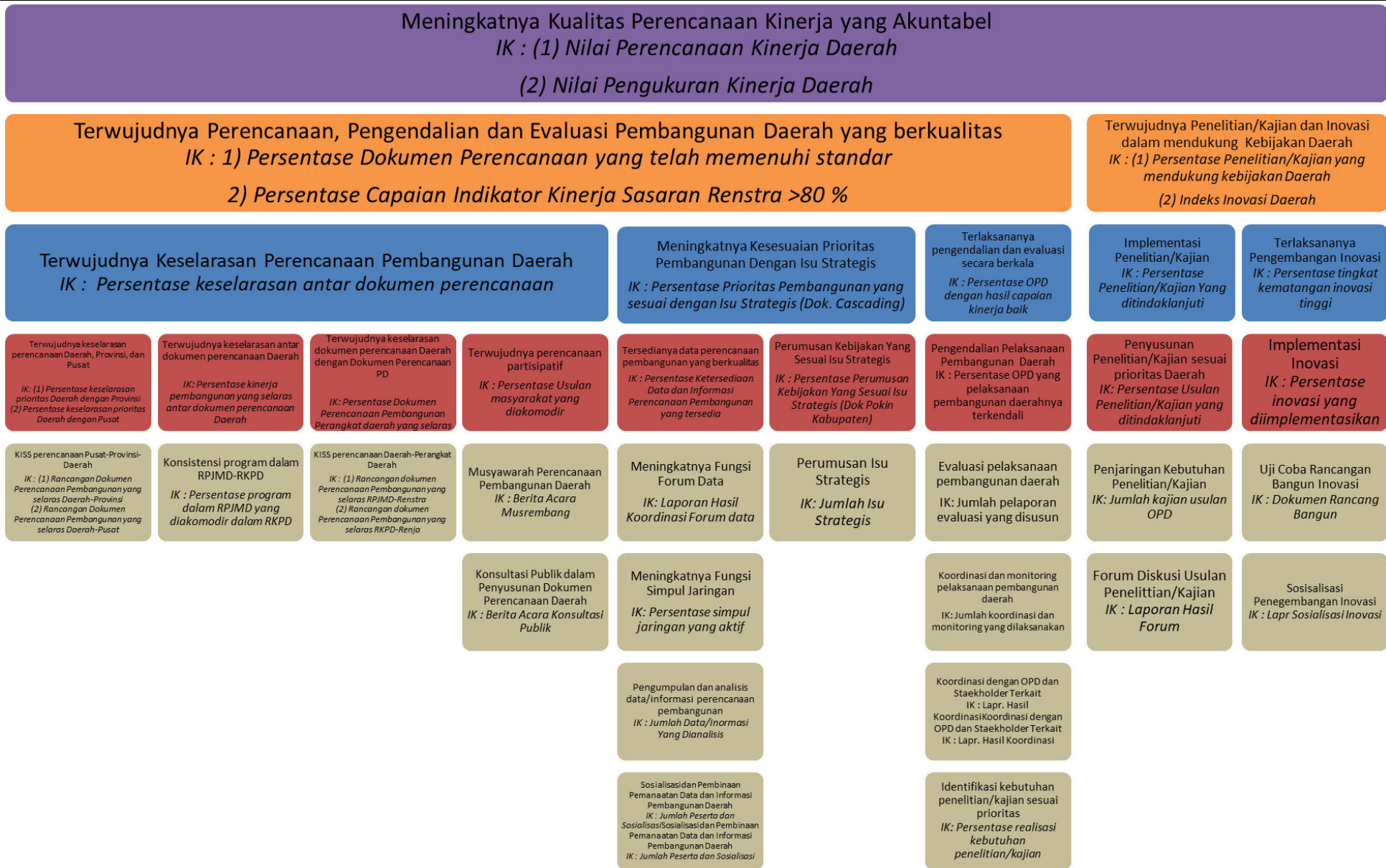
Tabel 5.3
Strategi dan Arah Kebijakan Perubahan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

Visi RPJMD : SAMPANG HEBAT BERMARTABAT			
Misi 4 RPJMD : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien			
TUJUAN PD	SASARAN PD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Pendampingan dan asistensi penyusunan Renja dan Renstra Perangkat Daerah
		Menerapkan Sistem Perencanaan dan Pengendalian berbasis spasial, teknologi dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan SIPD dalam penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dan simoneva dalam penyusunan laporan pengadalian dan evaluasi • Penerapan SIGATA dalam rangka perencanaan pembangunan daerah berbasis ruang
		Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra	Peningkatan koordinasi pengendalian dan evaluasi kinerja Renstra Perangkat Daerah
		Meningkatkan koordinasi dalam hal pengendalian dan perencanaan	
Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Meningkatkan kualitas Inovasi dan Teknologi	Peningkatan kualitas inovasi daerah dan koordinasi bidang penelitian dan pengembangan serta kajian yang implementatif
		Meningkatkan koordinasi dan kualitas bidang Litbang	

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2022

Pohon Kinerja (Cascading) adalah penjabaran kinerja dan indikator kinerja yang lebih terperinci atau kondisi-kondisi yang mempengaruhinya dengan menggunakan kerangka logis. Pohon Kinerja merupakan alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam

menghasilkan outcome yang diinginkan. Skema Pohon Kinerja adalah mencari atau menentukan akar permasalahan, yang kemudian diselesaikan secara kolektif oleh seluruh Perangkat Daerah terkait. Penjabaran Pokin dalam Perubahan Renstra Bappelitbangda Tahun 2019-204 tersebut dapat disajikan sebagai berikut :



Berdasarkan arah kebijakan yang tertuang dalam tabel diatas, pengembangan inovasi pelayanan Bappelitbangda yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan serta mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. SIG4TA

Pemerintah Daerah : Kabupaten Sampang
Organisasi Perangkat Daerah : Bappelitbangda Kabupaten Sampang
Nama Inovasi : SIG4TA (Sistem Integrasi Geospasial untuk Sampang Satu Data)
Bentuk Inovasi : Aplikasi Data dan Informasi Geospasial
Inovasi Dimulai : Juni 2021

Latar Belakang:

UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa kegiatan pembangunan harus direncanakan berdasarkan data spasial dan data non-spasial serta informasi lainnya yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 menegaskan bahwa aspek wilayah/spasial haruslah diintegrasikan dan menjadi bagian dari kerangka perencanaan pembangunan di semua tingkatan pemerintahan.

Sebelum era teknologi informasi, pengolahan data geospasial masih secara manual dalam peta kertas. Pencatatan ini menimbulkan kesulitan ketika di lakukan pencarian data. Selain itu data yang tersimpan dalam dokumen rentan terhadap kondisi usia kertas. Sejalan dengan mulai diperkenalkannya komputer untuk mendukung kegiatan operasional, banyak pengolahan data spasial mulai beralih dari sistem manual ke sistem yang berbasis komputer atau yang dikenal dengan sistem informasi geografis. Hal dimaksud dilakukan untuk mempermudah pengolahan serta penyajian informasi berbasis data spasial.

Pengolahan data geospasial selanjutnya mengalami perkembangan seiring dengan munculnya pendekatan geoportal. Geoportal dibuat untuk mempermudah aktivitas manajemen data spasial dimana sekumpulan data spasial tersebut saling terhubung, dapat digunakan secara bersamaan oleh banyak pengguna dan dibentuk untuk dapat menghasilkan informasi geospasial yang mudah diakses baik oleh instansi maupun masyarakat melalui internet (website). Oleh karena itu integrasi geospasial dalam satu geoportal menjadi hal yang sangat strategis dalam akurasi informasi pembangunan daerah. Integrasi geospasial sangat penting dalam mendukung

keberhasilan pembangunan daerah serta mendukung One Map Policy (Kebijakan Satu Peta) dan perwujudan Satu Data Indonesia.

Kabupaten Sampang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Pulau Madura, dengan luas wilayah mencapai 1.233,33 km² dibagi menjadi 14 kecamatan dan 186 desa/kelurahan dengan berbagai potensi sumber daya alam yang dapat dikelola untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Sampang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 59 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sampang, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan serta Tugas Pembantuan.

Penyediaan data dan informasi geospasial di Kabupaten Sampang saat ini masih terbatas pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sebagian besar belum dibangun dengan standart dan referensi yang sama (belum valid) dan tidak aktual (tidak sesuai dengan kondisi saat ini). Kendala lain adalah belum sinkronnya data yang ada pada berbagai institusi, sehingga data-data yang seharusnya saling berhubungan banyak terpisah-pisah dan sulit untuk diakses serta tidak terintegrasi. Keadaan di atas akan berpengaruh pada proses perencanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan karena terkadang ditemukan tumpang tindih program sehingga menyebabkan pengambilan kebijakan yang ditempuh tidak optimal. Untuk mewujudkan akurasi informasi pembangunan daerah, maka diperlukan penyelenggaraan informasi geospasial daerah yang dibangun dalam satu sistem yang memungkinkan mengintegrasikan data dalam satu basis data dan satu sistem referensi, memiliki standart data sesuai dengan kebijakan Satu Peta, memiliki metadata, serta memiliki kemampuan untuk berbagi pakai data/atau dipertukarkan antar sistem yang saling berinteraksi serta dapat diakses secara mudah dalam satu geoportal, mudah diakses dan dibagipakaikan. Penyelenggaraan informasi geospasial daerah harus didukung oleh Sumber Daya Manusia yang terlatih dan handal.

Tujuan dan Manfaat :

Tujuan:

1. Tujuan Jangka Pendek yang akan dicapai adalah:
 - 1) Penetapan komitmen bersama antar OPD untuk membangun data dan informasi berbasis spasial yang valid dan aktual;

- 2) Penetapan regulasi terkait dengan pelaksanaan integrasi geospasial berupa Keputusan Bupati dan Peraturan Bupati;
 - 3) Penyediaan online platform yang memungkinkan untuk pengintegrasian informasi geospasial, memiliki kemampuan untuk berbagipakai dan dapat diakses secara mudah;
 - 4) Penyiapan Sumberdaya Manusia SDM/Simpul Jaringan untuk pengelolaan data dan informasi geospasial; dan
 - 5) Pengimplementasian integrasi geospasial dan pengembangan metadata pada 3 (tiga) OPD.
2. Tujuan Jangka Menengah yang akan dicapai adalah:
- 1) Peningkatan produksi data spasial pada 10 (sepuluh) OPD;
 - 2) Peningkatan kapasitas SDM untuk pengelolaan data dan informasi geospasial; dan
 - 3) Peningkatan infrastruktur pendukung teknologi pusat data geospasial.
3. Tujuan Jangka Panjang yang akan dicapai adalah:
- 1) Pengembangan produksi data spasial pada seluruh OPD dan penambahan metadata;
 - 2) Pengembangan sistem data spasial yang terintegrasi secara luas pada beberapa sektor dengan platform geoportal; dan
 - 3) Pengembangan kebijakan perencanaan pembangunan wilayah.

Manfaat:

1. Manfaat Internal

- 1) Meningkatkan akurasi perencanaan pembangunan dengan penyediaan data berbasis spasial;
- 2) Meningkatkan capaian kinerja Bappelitbangda;
- 3) Meningkatkan kapasitas Sumber daya Perencana di daerah; dan
- 4) Mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sampang.

2. Manfaat External

- 1) Meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah dengan pengendalian dan evaluasi secara berkala;
- 2) Memberikan informasi yang real time kepada pembuat kebijakan;
- 3) Mendorong terwujudnya kebijakan satu data geospasial (One Map Policy) sebagai alat pemantauan dan evaluasi pembangunan daerah oleh masyarakat;
- 4) Mendorong kepastian usaha dan kemudahan berinvestasi bagi para pelaku usaha baik dari dalam negeri maupun luar negeri melalui penyediaan data dan informasi yang aktual; dan

- 5) Mendorong keterbukaan informasi publik melalui manajemen data spasial yang mudah diakses oleh siapapun serta memiliki kemampuan dalam berbagi data.

Hasil Inovasi:

Hasil dengan adanya aplikasi SIG4TA ini yaitu: **Pertama**, Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial (IG) dibangun dengan standar dan referensi yang sama serta aktual. **Kedua**, Penyediaan data dan informasi geospasial memiliki banyak metadata. **Ketiga**, data terintegrasi dalam satu sistem geoportal sehingga mudah diakses dan dibagipakaikan. Dan yang **Keempat**, terdapat simpul jaringan pada setiap OPD yang terlatih. Kemudian, untuk memberikan payung hukum dalam pelaksanaan inovasi ini serta kelanjutannya maka kondisi yang diharapkan yang **Kelima** yaitu disusunnya regulasi yang mengatur Penyelenggaraan Informasi Geospasial Daerah.

Isian Indikator

NO	Indikator Inovasi	Keterangan	Informasi
1	Regulasi Inovasi Daerah	Regulasi / Kebijakan yang ditetapkan untuk mendukung Inovasi Daerah	SK OPD
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Jumlah SDM yang melaksanakan inovasi daerah ini. jumlahnya ada berapa orang.	1-50 SDM
3	Dukungan Anggaran	Anggaran untuk inovasi daerah dituangkan dalam APBD	Anggaran untuk kegiatan inovasi sudah ada sampai tahap pelaksanaan inovasi
4	Penggunaan IT	Penggunaan alat elektronik, teknologi dan sistem informasi dalam inovasi daerah	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah menggunakan perangkat elektronik
5	Bimtek Inovasi	Suatu kegiatan yang diberikan pengguna inovasi daerah kepada pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan inovasi daerah	Pemerintah daerah Sudah melakukan Bimtek inovasi daerah
6	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	Inovasi Daerah masuk dalam program dan kegiatan Renstra OPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan rencana pengembangan inovasi ke dalam Resntra
7	Jejaring Inovasi	Interaksi antar pelaku inovasi daerah. misalkan antar OPD, antar Pemda, atau melibatkan pelayanan publik	Inovasi hanya berjalan di OPD tertentu
8	Replikasi	Inovasi daerah yang telah berhasil direplikasi ke daerah lain	Belum pernah direplikasi

9	Pedoman Teknis	Ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana inovasi daerah harus dilakukan	Sudah ada pedoman dan panduan teknis pengembangan inovasi daerah dan dapat diakses secara daring
10	Pengelola Inovasi	Pengelola inovasi ditetapkan dengan Surat Keputusan	Ditetapkan dengan SK OPD
11	Ketersediaan Informasi Layanan	Kesiapan informasi layanan untuk dapat digunakan	ada ketersediaan informasi secara elektronik
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	Penyelesaian informasi/ pemberitahuan yang disampaikan oleh pengguna tentang inovasi daerah	Pengaduan pengguna semua direspon dengan baik
13	Tingkat Partisipasi Stakeholder	Tindakan pihak-pihak tertentu dalam mengambil bagian pada kegiatan inovasi daerah	Belum ada pelibatan masyarakat & stakeholders dalam pengembangan inovasi daerah
14	Kemudahan Informasi Layanan	Tidak memerlukan banyak tenaga untuk memperoleh informasi layanan	Layanan Telp
15	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Tidak memerlukan banyak tenaga untuk melakukan inovasi	Sederhana
16	Online Sistem	Jaringan prosedur yang dibuat secara daring	Inovasi daerah dilakukan secara elektronik
17	Kecepatan Inovasi	Proses yang digunakan untuk mengakses inovasi daerah dalam satuan waktu. yang dimaksud sangat lambat (waktunya pengerjaannya kurang dari 6 bulan) yang dimaksud cukup cepat (waktunya pengerjaannya kurang dari 12 bulan) yang dimaksud lambat (waktunya pengerjaannya lebih dari 12 bulan)	Proses pelayanan publik oleh pemerintah daerah sudah cukup cepat
18	Kemanfaatan Inovasi	Inovasi daerah yang dihasilkan bermanfaat dan tidak menimbulkan pembenanan daerah	Ada manfaat dan tidak menimbulkan pembenanan daerah
19	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	Ketersediaan tingkat kepuasan inovasi daerah dapat dirasakan sesuai dengan yang diharapkan pengguna	hasil pengukuran kepuasan pengguna belum tersedia
20	Sosialisasi Kebijakan	Penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah dari pemerintahan daerah kepada pengguna inovasi daerah (pengguna dapat Pegawai ASN atau Masyarakat) dengan mengunggah foto kegiatan inovasi daerah dan/atau pelaksanaan inovasi dimaksud.	Sosialisasi dilakukan di tingkat Kabupaten dan Desa dan disebarluaskan melalui media massa (surat kabar)
21	Kualitas Inovasi Daerah	Kualitas inovasi Daerah dapat dibuktikan dengan video inovasi daerah (file MP4, Mov atau Avi)	Durasi video 5 menit dan apabila melebihi dapat dibagi menjadi 2 part. Memuat substansi berupa latar belakang, metode pemecahan

		masalah, ideation, strategi pemecahan masalah (solusi inovatif),
--	--	------------------------------------------------------------------

2. LITBANG BERBAGI

Pemerintah Daerah : Kabupaten Sampang
Organisasi Perangkat Daerah : Bappelitbangda Kabupaten Sampang
Nama Inovasi : LITBANG BERBAGI
Bentuk Inovasi : Tata Kelola Pemerintahan
Inovasi Dimulai : Tahun 2018 s/d sekarang

Latar Belakang:

Dalam rangka meningkatkan kualitas regulasi dan kebijakan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang dan perlu dilakukan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan tugas pemerintahan secara terarah, terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan, maka telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Permasalahan sering terjadi, antara lain adalah :

- Belum adanya standar, kriteria dan prosedur yang baku pada pelaksanaan kelitbangan;
- Belum adanya petunjuk operasional yang baku bagi para pelaku kelitbangan; dan
- Belum sinkronnya perencanaan kegiatan dan anggaran kelitbangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Salah satu upaya untuk mengoptimalkan kelitbangan tersebut, diperlukan adanya suatu petunjuk teknis operasional pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan yang sederhana dan mudah dipahami.

Tujuan dan Manfaat :

Tujuan:

Bertujuan menghasilkan pemahaman baru dan mengembangkan penerapan praktis, nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri di lingkungan Pemerintahan Daerah. Terdapat 4 (empat) tujuan Inovasi Research and Development Center (RDC) PPU yaitu:

1. RDC sebagai Pusat Data Kajian;
2. RDC sebagai pusat Analisa Kebijakan;
3. RDC sebagai Pusat Cipta Opini; dan
4. RDC sebagai Pusat Penelitian Partisipatif Universitas (non budget).

Manfaat:

Manfaat yang diperoleh dengan adanya pusat kajian kelitbang daerah atau Litbang Berinovasi ini dimaksudkan agar dalam pengambilan kebijakan daerah bertumpu kepada hal – hal yang bersifat fakta dan analisa. Kajian tidak sebatas potensi sumber daya alam tetapi juga mengenai sumber daya manusia serta kajian sosekbud. Selain itu Litbang akan memberi kemudahan akses bagi lembaga manapun untuk melakukan riset di Kabupaten Penajam Paser Utara sehingga akan memperkaya data riset/kajian daerah.

Hasil Inovasi: SABERNOVA

Isian Indikator :

NO.	INDIKATOR INOVASI	KETERANGAN	INFORMASI	DATA PENDUKUNG
1	Regulasi Inovasi Daerah	Regulasi / Kebijakan yang ditetapkan untuk mendukung Inovasi Daerah	SK OPD	Dokumen SK/Peraturan
2	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Jumlah SDM yang melaksanakan inovasi daerah ini. jumlahnya ada berapa orang.	1-50 SDM	SK Kegiatan
3	Dukungan Anggaran	Anggaran untuk inovasi daerah dituangkan dalam APBD	Anggaran untuk kegiatan inovasi sudah ada sampai tahap pelaksanaan inovasi	Dokumen Anggaran
4	Penggunaan IT	Penggunaan alat elektronik, teknologi dan sistem informasi dalam inovasi daerah	Pelaksanaan kerja di lingkungan pemerintah daerah menggunakan perangkat elektronik	Foto Kegiatan/gambar
5	Bimtek Inovasi	Suatu kegiatan yang diberikan pengguna inovasi daerah kepada pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan inovasi daerah	Pemerintah daerah Sudah melakukan Bimtek inovasi daerah	Foto Kegiatan/Screenshot
6	Program Dan Kegiatan Di Renstra OPD	Inovasi Daerah masuk dalam program dan kegiatan Renstra OPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan rencana pengembangan inovasi ke dalam Renstra	Dokumen Renstra

7	Jejaring Inovasi	Interaksi antar pelaku inovasi daerah. misalkan antar OPD, antar Pemda, atau melibatkan pelayanan publik	Inovasi hanya berjalan di OPD tertentu	Dokumen Laporan/Foto Kegiatan
8	Replikasi	Inovasi daerah yang telah berhasil direplikasi ke daerah lain	Belum pernah direplikasi, pernah direplikasi 1kali dst	Dokumen Kerjasama
9	Pedoman Teknis	Ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana inovasi daerah harus dilakukan	Sudah ada pedoman dan panduan teknis pengembangan inovasi daerah dan dapat diakses secara daring	Dokumen Laporan/Foto Kegiatan/Gambar
10	Pengelola Inovasi	Pengelola inovasi ditetapkan dengan Surat Keputusan	Ditetapkan dengan SK OPD	Dokumen Laporan/Foto Kegiatan/Gambar
11	Ketersediaan Informasi Layanan	Kesiapan informasi layanan untuk dapat digunakan	ada ketersediaan informasi secara elektronik	Dokumen Laporan/Foto Kegiatan/Gambar
12	Penyelesaian Layanan Pengaduan	Penyelesaian informasi/ pemberitahuan yang disampaikan oleh pengguna tentang inovasi daerah	Pengaduan pengguna semua direspon dengan baik dg adanya Call Center / Medsos/ Aplikasi Pengaduan	Dokumen Laporan/Foto Kegiatan/Gambar
13	Tingkat Partisipasi Stakeholder	Tindakan pihak pihak tertentu dalam mengambil bagian pada kegiatan inovasi daerah	Sudah ada pelibatan Masyarakat/ Masyarakat dan Akademisi/Masyarakat, Akademisi dan Media	Dokumen Laporan/Foto Kegiatan/Gambar
14	Kemudahan Informasi Layanan	Tidak memerlukan banyak tenaga untuk memperoleh informasi layanan	Layanan Telp/ Email/Aplikasi Online	Dokumen Laporan/Foto Kegiatan/Gambar
15	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Tidak memerlukan banyak tenaga untuk melakukan inovasi	Dapat dilakukan dalam waktu 8 hari keatas,/3-7 hari/1-2 hari	Dokumen Laporan/Foto Kegiatan/Gambar

16	Online Sistem	Jaringan prosedur yang dibuat secara daring	Inovasi daerah dilakukan secara elektronik ukungan melalui web/Sosmed/Perangkat / Web dan Aplikasi Mode Android/IOS	Dokumen Laporan/Foto Kegiatan/Gambar
17	Kecepatan Inovasi	Proses yang digunakan untuk mengakses inovasi daerah dalam satuan waktu yang	Proses pelayanan publik oleh pemerintah daerah sudah cukup cepat	Dokumen Laporan/Foto Kegiatan/Gambar
		dimaksud sangat lambat (waktunya pengerjaanya kurang dari 6 bulan)		
		yang dimaksud cukup cepat (waktunya pengerjaanya kurang dari 12 bulan) yang dimaksud lambat (waktunya pengerjaanya lebih dari 12 bulan)		
18	Kemanfaatan Inovasi	Inovasi daerah yang dihasilkan bermanfaat dan tidak menimbulkan pembenanan daerah	Ada manfaat dan tidak menimbulkan pembebanan daerah	Dokumen Laporan/Foto Kegiatan/Gambar
19	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	Ketersediaan tingkat kepuasan inovasi daerah dapat dirasakan sesuai dengan yang diharapkan pengguna	hasil pengukuran kepuasan pengguna belum tersedia	Dokumen Laporan/Foto Kegiatan/Gambar
20	Sosialisasi Kebijakan	Penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah dari pemerintahan daerah kepada pengguna inovasi daerah (pengguna dapat Pegawai ASN atau Masyarakat) dengan mengunggah foto kegiatan inovasi daerah dan/atau pelaksanaan inovasi dimaksud.	Sosialisasi dilakukan di tingkat Kabupaten dan Desa dan disebarluaskan melalui media massa (surat kabar)	Dokumen Laporan/Foto Kegiatan/Gambar
21	Kualitas Inovasi Daerah	Kualitas inovasi Daerah dapat dibuktikan dengan video inovasi daerah (file MP4, Mov atau Avi)	Durasi video 5 menit dan apabila melebihi dapat dibagi menjadi 2 part.	

			Memuat substansi berupa latar belakang, metode pemecahan masalah, ideation, strategi pemecahan masalah (solusi inovatif),	
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

3. BENGKEL SI RENCA

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara tersurat menyebutkan ketentuan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Ketentuan tersebut dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah yang sarannya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: Peningkatan Pelayanan Publik, Pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan Peningkatan daya saing Daerah. Inovasi Daerah hadir dalam bentuk Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Sampang merupakan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan. Hal ini sejalan dengan ketentuan di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan. Pengendalian dan evaluasi tersebut dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara efektif dan efisien. Seluruh proses perencanaan tersebut perlu koordinasi, sinergi dan harmonisasi yang melibatkan Perangkat Daerah.

Team Leader selaku Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Rendalev) pada Bappelitbangda Kabupaten Sampang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 9 Tahun 2022

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sampang, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, salah satu fungsi yang harus dijalankan oleh Bidang Rendalev yaitu pengintegrasian dan sinergitas kegiatan pembangunan. Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut diperlukan koordinasi yang intensif dengan Unit kerja lain di Bappelitbangda maupun dengan Perangkat Daerah lainnya.

Sejak berlaku efektifnya Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah pada awal tahun 2020, Daerah-daerah di seluruh Indonesia di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota beralih dari aplikasi yang beraneka ragam ke Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Sistem tersebut terintegrasi dari tingkat Daerah, Provinsi hingga Pusat. Dengan digunakannya SIPD, maka menu program hingga sub-kegiatan konsisten dari tahapan perencanaan hingga penganggaran. Namun demikian, menu program hingga sub-kegiatan yang tersedia masih memerlukan proses integrasi dan sinergitas agar mendukung prioritas pembangunan maupun program strategis di Daerah.

Menu program hingga sub-kegiatan tersebut disajikan berdasarkan Permendagri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan Permendagri tersebut, klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur yang ada dapat dimutakhirkan berdasarkan usulan Pemerintah Daerah, perubahan kebijakan, dan/atau peraturan perundang-undangan. Tercatat dalam dua tahun terakhir sudah dilakukan 2 (dua) kali pemutakhiran yang ditetapkan dengan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Ini menunjukkan adanya ketentuan yang relatif dinamis. Hal ini tentu memerlukan pengawalan agar maksud dari adanya pemutakhiran tersebut bisa diimplementasikan secara baik dalam Dokumen Rencana Daerah maupun Dokumen Rencana Perangkat Daerah yang diinput melalui SIPD.

Proses integrasi dan sinergitas kegiatan pembangunan sebagai salah satu fungsi Bidang Rendalev selama ini dilakukan dengan mengandalkan beberapa kali pertemuan tatap muka yang tentu kurang efektif dan efisien. Disamping itu, beberapa data dan kertas kerja perencanaan juga sering dijumpai berselisih antara OPD dan Bappelitbangda sehingga sering dijumpai inkonsistensi antara kertas kerja dengan dokumen perencanaan. Ditambah lagi data dan kertas kerja

perencanaan terpisah-pisah secara sektoral, serta proses kerja perencanaan tidak terdokumentasikan dengan baik. Akibatnya, kebijakan-kebijakan pembangunan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah kurang mendapat dukungan kinerja yang memadai sehingga tidak mampu memberikan hasil yang optimal bagi pencapaian kinerja.

Dalam konteks Peningkatan Kinerja Perencanaan Pembangunan, melalui pelaksanaan fungsi Bidang Rendalev dalam proses integrasi dan sinergitas kegiatan pembangunan secara efektif dan efisien, maka perlu dibangun ruang kerja virtual, yang menggantikan pertemuan secara tatap muka. Cara ini juga sejalan dengan kondisi Pandemi COVID-19, yang memberlakukan pembatasan kegiatan tatap muka. Penggunaan teknologi informasi seperti ini juga sejalan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penerapan SPBE menjadi urgen di era digital 4.0 karena membantu meningkatkan kinerja organisasi serta mendukung kebijakan keterbukaan informasi publik.

Ruang kerja virtual tersebut, yang selanjutnya disebut Bengkel SiRENCA (Bengkel Sinergi dan Integrasi Perencanaan Pembangunan), menyediakan kertas kerja yang mempertemukan Bappelitbangda dan Perangkat Daerah yang di dalamnya bisa bekerja bersama dan saling berinteraksi. Bappelitbangda selaku pengampu Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan, dalam pelaksanaannya diwakili oleh Konsolidator. Sebagai informasi, Konsolidator sebagaimana dimaksud merupakan Tim yang ditunjuk untuk melaksanakan konsolidasi, harmonisasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan Daerah serta optimalisasi fungsi-fungsi Bidang pada Bappelitbangda Kabupaten Sampang, yang di tetapkan dengan Keputusan Kepala Bappelitbangda Kabupaten Sampang. Adapun Perangkat Daerah selaku klien diwakili oleh Pejabat/Staf yang membidangi penyusunan perencanaan program/kegiatan. Para Konsolidator Perencanaan dan Perangkat Daerah ini yang memanfaatkan ruang kerja virtual yang beroperasi secara daring. Dengan demikian, Bengkel SiRENCA bisa dijalankan dengan fungsi remote working, yang memungkinkan pengguna layanan, bisa mengakses dari manapun dan kapanpun, serta tidak harus membuka laptop karena tugas bisa dikerjakan melalui smartphone.

Secara teknis Bengkel SiRENCA memanfaatkan website resmi Bappelitbangda Kabupaten Sampang dan Google Spreadsheet. Website Bappelitbangda dijadikan sebagai portal untuk mengakses ruang kerja virtual dengan memberikan tambahan menu. Google Spreadsheet digunakan sebagai *Platform* untuk membangun ruang kerja virtual. Ruang Kerja diatur berbatas akses, yang memungkinkan Konsolidator

Perencanaan dan Perangkat Daerah hanya bisa bekerja di Ruang Kerja masing-masing yang sudah disiapkan. Secara simultan, Konsolidator Perencanaan juga bisa melakukan pemantauan dan supervisi pada pekerjaan Perangkat Daerah kliennya. Dengan demikian, dibangunnya Aplikasi Bengkel SiRENCA, diharapkan proses integrasi dan sinergitas perencanaan pembangunan bisa dijalankan secara efektif dan efisien. Aplikasi ini juga diharapkan bisa mengawal kebijakan-kebijakan pembangunan dengan dukungan kinerja yang memadai sehingga mampu memberikan hasil yang lebih baik lagi dalam pencapaian kinerja. Sebagai sebuah aksi perubahan, ruang kerja virtual ini diharapkan bisa menjadi katalisator dalam upaya meningkatkan efektivitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.

1.2 Tujuan dan Manfaat Aksi Perubahan

Tujuan Aksi Perubahan terdiri dari tujuan Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang.

A. Tujuan Jangka Pendek:

1. Tersedianya ruang kerja virtual yang memudahkan proses integrasi dan sinergitas perencanaan pembangunan
2. Diterapkannya satu data dan satu kertas kerja perencanaan
3. Diterapkannya integrasi data dan kertas kerja perencanaan yang bisa berbagi pakai
4. Kertas Kerja Perencanaan terdokumentasikan dengan baik

B. Tujuan Jangka Menengah

Terkawalnya kebijakan pembangunan dengan dukungan perencanaan kinerja yang memadai

C. Tujuan Jangka Panjang

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.

Manfaat Aksi Perubahan terdiri dari Manfaat bagi *Team Leader*, Manfaat bagi Organisasi, dan Manfaat bagi Penerima Manfaat

A. Manfaat bagi *Team Leader*

1. Memudahkan proses penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Dokumen Rencana Perangkat Daerah
2. Memudahkan dalam mengawal konsistensi indikator kinerja yang tersedia di dalam Kertas Kerja Perencanaan dengan yang diinput di dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

B. Manfaat bagi Organisasi

1. Meningkatkan kinerja organisasi Bappelitbangda dalam proses integrasi dan sinergitas perencanaan pembangunan
2. Mengawal kebijakan pembangunan dengan dukungan perencanaan kinerja yang memadai
3. Mendukung transparansi dan akuntabilitas kinerja organisasi

C. Manfaat bagi Penerima Manfaat

1. Meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah melalui penyediaan data dan kertas kerja perencanaan yang terintegrasi dan bisa berbagi pakai
2. Mendorong keterbukaan informasi publik

1.3 Adopsi dan Adaptasi Studi Lapangan

Berdasarkan *lesson learnt* hasil Studi Lapangan pada lokus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat pada 22-25 Maret 2022, terdapat 3 (tiga) *lesson learnt* yang diadopsi dan diadaptasi oleh *Team Leader* terkait dengan Aksi Perubahan dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepemimpinan Transformasional

Kepemimpinan transformasional merupakan gaya kepemimpinan yang menginspirasi dan memberdayakan individu, kelompok dan organisasi dengan cara mentransformasi paradigma dan nilai-nilai organisasi menuju kemandirian. Untuk mentransformasi paradigma dan nilai-nilai tersebut diperlukan pemimpin yang teladan dan mampu membangun optimisme dan percaya diri para pengikutnya dalam rangka melakukan pekerjaan secara optimal.

2. Pemanfaatan Teknologi atau Digital Organization

Era Digital 4.0 tidak bisa dihindari dan telah melahirkan tuntutan publik akan pelayanan pemerintah yang tepat waktu, tidak bertele-tele, dan transparan. Salah satu faktor yang bisa menjawab tantangan ini adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi ini untuk mengoptimalkan kegiatan operasional yang mampu membantu proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, sehingga dapat mempercepat proses pengambilan keputusan. Karena teknologi informasi memegang peran dalam memangkas birokrasi yang berbelit, maka efektivitas dan efisiensi kerja organisasi akan semakin meningkat.

3. Inovasi Pelayanan

Inovasi dimaknai dengan upaya dan strategi untuk terus mengembangkan diri dan organisasi menjadi lebih baik untuk mencapai kinerja yang optimal. Untuk

dapat menampilkan kinerja organisasi yang memuaskan atau tidak, diperlukan terobosan-terobosan instansional yang bersifat strategis dan tepat guna. Keberanian berinovasi memberikan peluang untuk menghasilkan sesuatu hal baru yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain.

1.4 Ruang Lingkup Aksi Perubahan

Pada penyusunan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi (Jangka Pendek) ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pembuatan Aplikasi Bengkel SiRENCA untuk keperluan integrasi dan sinergitas perencanaan pembangunan menurut keperluan tertentu, yakni:
 - a. Prioritas pembangunan yang dituangkan dalam RKPD 2023. Ini hanya meliputi program pembangunan yang direncanakan akan dianggarkan melalui APBD Kabupaten Sampang.
 - b. Program Strategis Daerah yang membutuhkan dukungan kegiatan lintas sektor. Ini meliputi kegiatan pembangunan yang direncanakan akan dianggarkan melalui APBD Kabupaten Sampang.
 - c. *Cascading* kinerja seluruh perangkat daerah dengan memperhatikan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
2. Ruang kerja virtual tersebut dapat diakses melalui portal resmi Bappelitbangda Kabupaten Sampang (<https://Bappelitbangda.sampangkab.go.id/>) dengan Penambahan Menu sesuai dengan penamaan Inovasi, Bengkel SiRENCA
3. Substansi ruang kerja virtual berupa Kertas Kerja Perencanaan yang dibangun menggunakan *Platform* Google Spreadsheet.
4. Melakukan koordinasi antarbidang lingkup Bappelitbangda dan pihak-pihak terkait lainnya yang dapat mendukung terlaksananya aksi perubahan.

Untuk mempertajam ruang lingkup aksi perubahan, maka tahapan-tahapan penting (milestones) yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Aksi Perubahan
2. Pembuatan Rancang Bangun Aplikasi Bengkel SiRENCA
3. Pembuatan Aplikasi Bengkel SiRENCA
4. Pembuatan Buku Panduan
5. Pelaksanaan Sosialisasi, Pelatihan, dan Launching Aplikasi Bengkel SiRENCA
6. Pembuatan Surat Edaran Bupati tentang Pemanfaatan Aplikasi Bengkel SiRENCA
7. Pemanfaatan Aplikasi Bengkel SiRENCA

8. Laporan dan Evaluasi

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappelitbangda selama 2019-2024 merupakan program-program prioritas RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bappelitbangda. Rencana program dan kegiatan beserta pagu indikatif dijabarkan ke dalam matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah. Program dan kegiatan yang dirumuskan di renstra ini kemudian dijadikan acuan dan pedoman penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Penjabaran Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Perubahan Renstra Bappelitbangda Tahun 2019-2024 tersebut terlampir dalam tabel matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Bappelitbangda Tahun 2019-2024 sebagaimana terlampir.

Tabel 6.1
Matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Bappelitbangda Tahun 2019-2024

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM /KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN AWAL (2018)	REALISASI KINERJA DAN PENDANAAN				TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KONDISI AKHIR		UNIT KERJA	LOKASI
							2019		2020		2021		2022		2023		2024		Kinerja	Rp.		
							Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.				
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23
URUSAN PERENCANAAN							7.207.382.942												7.207.382.942			
		4.03.4.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	100	597.475.913											100	597.475.913		
		4.03.4.03.01.01.01.	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Jumlah Surat Terkirim	Surat	873	1130	223.715.040											2003	223.715.040	Sekretariat	Bappelitbangda
				Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Listrik, Air dan Komunikasi	Bulan	12	12												24		Sekretariat	Bappelitbangda
				Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional Yang Memperoleh Jasa Perizinan	Unit	20	31												51		Sekretariat	Bappelitbangda
				Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Jasa Kebersihan	OB	12	12												24		Sekretariat	Bappelitbangda
				Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis	OB	19	12												31		Sekretariat	Bappelitbangda
				Jumlah Bahan Bacaan Yang Disediakan	Exemplar	-	-												-		Sekretariat	Bappelitbangda
				Jumlah alat kebersihan yang disediakan	Jenis	15	15												30		Sekretariat	Bappelitbangda
				Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Makanan dan Minuman	OK	-	-												--		Sekretariat	Bappelitbangda
		4.03.4.03.01.01.02.	Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	Jumlah ATK	Jenis	46	36	116.653.815											82	116.653.815	Sekretariat	Bappelitbangda
				Jumlah barang cetakan	Jenis	12	10												22		Sekretariat	Bappelitbangda
				Jumlah penggandaan	Lembar	68688	48798												117486		Sekretariat	Bappelitbangda
				Jumlah Komponen instalasi listrik	Jenis	11	3												14		Sekretariat	Bappelitbangda
				Jumlah Pemenuhan Kebutuhan makanan dan minuman tamu dan rapat	OK	1075	1008												2083		Sekretariat	Bappelitbangda

			Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan	Macam	2	2											4		Sekretariat	Bappelitbangda
			Jumlah Alat Kebersihan Yang Disediakan	Jenis	-	-											-		Sekretariat	Bappelitbangda
	4.03.4.03.01.01.03.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah Koordinasi Dalam Daerah	Kali	14	13	257.107.058										27	257.107.058	Sekretariat	Bappelitbangda
			Jumlah Koordinasi Luar Daerah	Kali	26	82											108		Sekretariat	Bappelitbangda
	4.03.4.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	%	100	100	486.777.400										100	486.777.400		
	4.03.4.03.01.02.01.	Pembangunan/ Rehab/ Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Unit	1	1	269.209.108										2	269.209.108	Sekretariat	Bappelitbangda
	4.03.4.03.01.02.03.	Pengadaan/ Pemeliharaan Kendaraan Dinas Opsional	Jumlah Kendaraan dinas R4 yang dipelihara	Unit	4	4	85.378.834										8	85.378.834	Sekretariat	Bappelitbangda
	4.03.4.03.01.02.04.	Pengadaan/ Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan Kantor	Unit	-	5	132.189.458										5	132.189.458	Sekretariat	Bappelitbangda
			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Dipelihara	Unit	9	41											50		Sekretariat	Bappelitbangda
			Jumlah Spanduk/ Umbul-umbul/ Bendera Yang Disediakan	Jenis	2	3											5		Sekretariat	Bappelitbangda
			Jumlah Komputer Yang Disediakan	Unit	1	-											1		Sekretariat	Bappelitbangda
			Jumlah Printer Yang Disediakan	Unit	2	-											2		Sekretariat	Bappelitbangda
			Jumlah meubelair yang dipelihara	Unit	30	50											80		Sekretariat	Bappelitbangda
	4.03.4.03.01.03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur Yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Aparatur	%	100	100	50.127.790										100	50.127.790		
	4.03.4.03.01.03.01.	Pelaksanaan Bimtek/ Sosialisasi/ Seminar	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek/ Sosialisasi/ Seminar	ASN	12	16	50.127.790										28	50.127.790	Sekretariat	Bappelitbangda
	4.03.4.03.01.04.	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelayanan publik yang	%	100	100	44.854.650										100	44.854.650		

	4.03.4.03.01.04.01.	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/ Non Fisik, Laporan Triwulanan, Laporan Semesteran, Laporan Akhir Tahun, CALK.	Dok	6	6	14.887.500											12	14.887.500	Sekretariat	Bappelitbangda
	4.03.4.03.01.04.02.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA	Dok	-	7	14.968.000											7	14.968.000	Sekretariat	Bappelitbangda
	4.03.4.03.01.04.03.	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Promosi Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Kali	1	1	14.999.150											2	14.999.150	Sekretariat	Bappelitbangda
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	a. Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dengan Perda/Perkada	%	100	100	1.240.198.475											100	1.240.198.475		
			b. Persentase usulan kegiatan yang disepakati dalam Musrenbang dan pokok-pokok pikiran RPJMD yang ditetapkan	%	100	100												100			
		Penyusunan RPJMD	Jumlah dokumen RPJMD yang ditetapkan dengan Perda	Dok	1	1	385.288.586											2	385.288.586	Rendalev	Bappelitbangda
		Penyusunan RKPDP	01. Jumlah dokumen RKPDP Tahun n yang ditetapkan dengan Perkada	Dok	1	1	717.479.297											2	717.479.297	Rendalev	Bappelitbangda
			02. Jumlah dokumen Perubahan RKPDP Tahun n-1 yang ditetapkan dengan Perkada	Dok	1	1												2		Rendalev	Bappelitbangda
		Fasilitasi Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	01. Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada	Dok	42	42	56.871.472											84	56.871.472	Rendalev	Bappelitbangda
			02. Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun n yang ditetapkan dengan Perkada	Dok	42	42												84		Rendalev	Bappelitbangda
			03. Jumlah dokumen Perubahan Renja Tahun n-1 yang ditetapkan dengan Perkada/SK Kepala Daerah	Dok	42	42												84		Rendalev	Bappelitbangda
		Fasilitasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)	01. Jumlah koordinasi fasilitasi DAK yang dilaksanakan	Kali	12	12	80.559.120											24	80.559.120	Rendalev	Bappelitbangda
			02. Jumlah laporan pelaksanaan DAK yang disusun	Dok	4	4												8		Rendalev	Bappelitbangda
		Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Persentase rencana kegiatan lingkup bidang ekonomi yang tertuang dalam RKPDP secara konsisten dan selaras	%	100	100	909.934.250											100	909.934.250		
		Fasilitasi Penyusunan dokumen rencana pembangunan pertanian	01. Jumlah laporan hasil koordinasi sub-bidang pertanian yang disusun	Dok	1	1	237.793.782											2	237.793.782	Ekspraswil	Bappelitbangda
			02. Jumlah dokumen perencanaan sub-bidang pertanian yang disusun/ direview	Dok	1	1												2		Ekspraswil	Bappelitbangda

			01. Jumlah laporan hasil koordinasi sub-bidang industri, perdagangan dan pengembangan usaha yang disusun	Dok	1	1	163.844.572													2	163.844.572	Ekspraswil	Bappelitbangda
			02. Jumlah dokumen perencanaan sub-bidang industri, perdagangan dan pengembangan usaha yang disusun/direview	Dok	1	1														2		Ekspraswil	Bappelitbangda
			01. Jumlah laporan hasil koordinasi sub-bidang koperasi, usaha mikro dan ekonomi kreatif yang disusun	Dok	1	1	408.163.335													2	408.163.335	Ekspraswil	Bappelitbangda
			02. Jumlah dokumen perencanaan sub-bidang koperasi, usaha mikro dan ekonomi kreatif yang disusun/direview	Dok	2	2														4		Ekspraswil	Bappelitbangda
			Penunjang Program Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah	Jumlah laporan hasil koordinasi fasilitasi APP yang disusun	Dok	1	1	76.875.910												2	76.875.910	Ekspraswil	Bappelitbangda
			Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga	Jumlah laporan hasil koordinasi kerjasama dengan dunia usaha yang disusun	Dok	1	1	23.256.651												2	23.256.651	Ekspraswil	Bappelitbangda
			Program Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah	Persentase rencana kegiatan lingkup bidang prasarana wilayah yang tertuang dalam RKPD secara keseluruhan dan salarasa	%	100	100	1.551.079.294												100	1.551.079.294		
			Fasilitasi dan penyusunan rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan	01. Jumlah laporan hasil koordinasi sub bidang Prasarana Perhubungan yang disusun	Dok	1	1	368.546.011												2	368.546.011	Ekspraswil	Bappelitbangda
				02. Jumlah dokumen perencanaan sub bidang Prasarana Perhubungan yang disusun/direview	Dok	1	1													2		Ekspraswil	Bappelitbangda
			Fasilitasi dan penyusunan rencana pembangunan sumber daya air, alam, dan lingkungan hidup	01. Jumlah laporan hasil koordinasi sub bidang sumber daya air dan lingkungan hidup yang disusun	Dok	1	1	302.628.136												2	302.628.136	Ekspraswil	Bappelitbangda
				02. Jumlah dokumen perencanaan sub bidang sumber daya air dan lingkungan hidup yang disusun/direview	Dok	1	1													2		Ekspraswil	Bappelitbangda
			Fasilitasi dan Penyusunan Rencana Pengembangan Perumahan dan Pemukiman	01. Jumlah laporan hasil koordinasi sub bidang perumahan dan permukiman yang disusun	Dok	1	1	613.902.208												2	613.902.208	Ekspraswil	Bappelitbangda
				02. Jumlah dokumen perencanaan sub bidang perumahan dan permukiman yang disusun/direview	Dok	2	2													4		Ekspraswil	Bappelitbangda
			Fasilitasi dan Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Wilayah	01. Jumlah laporan hasil koordinasi sub bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang wilayah yang disusun	Dok	1	1	266.002.939												2	266.002.939	Ekspraswil	Bappelitbangda
				02. Jumlah dokumen perencanaan sub bidang perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang wilayah yang	Dok	1	1													2		Ekspraswil	Bappelitbangda
			Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Pemerintahan	Persentase rencana kegiatan lingkup bidang sosial budaya dan pemerintahan yang tertuang dalam RKPD secara	%	100	100	762.156.536												100	762.156.536		

			Facilitasi dan Penyusunan Rencana Pembangunan Bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Kepemudaan	01. Jumlah laporan hasil koordinasi sub bidang pendidikan, kebudayaan dan kepemudaan yang disusun	Dok	1	1	219.019.280											2	219.019.280	PPM	Bappelitbangda
				02. Jumlah dokumen sub bidang pendidikan, kebudayaan dan kepemudaan yang disusun/direview	Dok	1	1												2		PPM	Bappelitbangda
			Facilitasi dan Penyusunan Rencana Pembangunan Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	01. Jumlah laporan hasil koordinasi sub bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial yang disusun	Dok	1	1	239.703.496											2	239.703.496	PPM	Bappelitbangda
				02. Jumlah dokumen sub bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial yang disusun/direview	Dok	1	1												2		PPM	Bappelitbangda
			Facilitasi dan Penyusunan Rencana Pembangunan Pemerintahan dan Desa	01. Jumlah laporan hasil koordinasi sub bidang pemerintahan dan desa yang disusun	Dok	1	1	146.168.133											2	146.168.133	PPM	Bappelitbangda
				02. Jumlah dokumen sub bidang pemerintahan dan desa yang disusun/direview	Dok	3	2												5		PPM	Bappelitbangda
			Facilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah yang disusun	Dok	2	2	157.265.627											4	157.265.627	PPM	Bappelitbangda
			Program Pengembangan Data, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan	a. Persentase program/kegiatan Renja Perangkat Daerah yang konsisten dan selaras dengan Ransra Pararakat	%	100	100	1.564.778.634											100	1.564.778.634		
				b. Persentase program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah yang konsisten dan selaras dengan Ransra Pararakat	%	100	100												100			
			Penyusunan Data, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan	01. Dokumen LKPU Bupati Sampang Tahun 2018 yang disusun	Dok	1	1	931.501.097											2	931.501.097	Rendalev	Bappelitbangda
				02. Jumlah Laporan pelaksanaan program pembangunan daerah yang disusun	Lapr	12	8												20		Rendalev	Bappelitbangda
				03. Jumlah dokumen SIPD yang disusun	Dok	1	1												2		Rendalev	Bappelitbangda
				04. Jumlah dokumen Profil Daerah yang disusun	Dok	1	1												2		Rendalev	Bappelitbangda
				Dokumen Pelaksanaan Koordinasi TP2D	Dok	1	1												2		Rendalev	Bappelitbangda
			Pembangunan Infra Struktur Data Spasial	Jumlah landuse/penutupan Kabupaten Sampang yang disusun	Kec	1	2	633.277.537											3	633.277.537	Rendalev	Bappelitbangda
URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								597.131.099												597.131.099		

			Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	%	100	100	597.131.099										100	597.131.099			
			Fasilitasi Litbang Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan sosial budaya yang disusun	Dok	1	1	186.559.143										2	186.559.143	Litbang	Bappelitbangda	
			Fasilitasi Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang disusun	Dok	1	1	410.571.956										2	410.571.956	Litbang	Bappelitbangda	
			Fasilitasi Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah laporan hasil fasilitas Inotek yang disusun	Dok	1	-											1		Litbang	Bappelitbangda	
JUMLAH 2019								7.804.514.041											7.804.514.041			
URUSAN PERENCANAAN																				4.547.633.162		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian program																					
		4.03.4.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100		100	598.564.539									100	598.564.539			
		4.03.4.03.01.01.01.	Pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran	Jumlah Surat Terkirim	Surat	873		2560	343.428.434									3433	343.428.434	Sekretariat	Bappelitbangda	
				Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Listrik, Air dan Komunikasi	Bulan	12		12										24		Sekretariat	Bappelitbangda	
				Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional Yang Memperoleh Jasa Perizinan	Unit	20		15										35		Sekretariat	Bappelitbangda	
				Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Jasa Kebersihan	OB	12		12										24		Sekretariat	Bappelitbangda	
				Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis	OB	19		14										33		Sekretariat	Bappelitbangda	
				Jumlah Bahan Bacaan Yang Disediakan	Exemplar	-		1095										1095		Sekretariat	Bappelitbangda	
				Jumlah alat kebersihan yang disediakan	Jenis	15		-										15		Sekretariat	Bappelitbangda	
				Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Makanan dan Minuman	OK	-		341										341		Sekretariat	Bappelitbangda	

	4.03.4.03.01.01.02.	Penyediaan Sarana Administrasi Perkantoran	Jumlah ATK	Jenis	46			22	84.061.837									68	84.061.837	Sekretariat	Bappelitbangda
			Jumlah barang cetakan	Jenis	12			12										24		Sekretariat	Bappelitbangda
			Jumlah penggandaan	Lembar	68688			19498										88186		Sekretariat	Bappelitbangda
			Jumlah Komponen instalasi listrik	Jenis	11			4										15		Sekretariat	Bappelitbangda
			Jumlah Pemenuhan Kebutuhan makanan dan minuman tamu dan rapat	OK	1075			-										1075		Sekretariat	Bappelitbangda
			Jumlah Bahan Bacaan yang disediakan	Macam	2			-										2		Sekretariat	Bappelitbangda
			Jumlah Alat Kebersihan Yang Disediakan	Jenis				11										11		Sekretariat	Bappelitbangda
	4.03.4.03.01.01.03.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah Koordinasi Dalam Daerah	Kali	14			13	171.074.268									27	171.074.268	Sekretariat	Bappelitbangda
			Jumlah Koordinasi Luar Daerah	Kali	26			39										65		Sekretariat	Bappelitbangda
	4.03.4.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik	%	100			100	205.186.301									100	205.186.301		
	4.03.4.03.01.02.01.	Pembangunan/ Rehab/ Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Unit	1			1	75.690.426									2	75.690.426	Sekretariat	Bappelitbangda
	4.03.4.03.01.02.03.	Pengadaan/ Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan dinas R4 yang dipelihara	Unit	4			4	60.218.482									8	60.218.482	Sekretariat	Bappelitbangda
	4.03.4.03.01.02.04.	Pengadaan/ Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan Kantor	Unit	-			-	69.277.393									-	69.277.393	Sekretariat	Bappelitbangda
			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Dipelihara	Unit	9			9										18		Sekretariat	Bappelitbangda
			Jumlah Spanduk/ Umbul-umbul/ Bendera Yang Disediakan	Jenis	2			3										5		Sekretariat	Bappelitbangda
			Jumlah Komputer Yang Disediakan	Unit	1			3										4		Sekretariat	Bappelitbangda

			Jumlah Printer Yang Disediakan	Unit	2			1										3		Sekretariat	Bappelitbangda	
			Jumlah meubelair yang dipelihara	Unit	30			-										30		Sekretariat	Bappelitbangda	
		4.03.4.03.01.03.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur Yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Aparatur	5%	100		100	121.250.000									100	121.250.000			
		4.03.4.03.01.03.01.	Pelaksanaan Bimtek/ Sosialisasi/ Seminar	Jumlah ASN yang mengikuti Bimtek/ Sosialisasi/ Seminar	ASN	12		25	121.250.000									37	121.250.000	Sekretariat	Bappelitbangda	
		4.03.4.03.01.04.	Program Peningkatan Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Pelayanan Informasi Publik	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja, dan pelaksanaan publik yang	%	100			20.548.220									100	20.548.220			
		4.03.4.03.01.04.01.	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan	Jumlah Laporan Kemajuan Fisik/ Non Fisik, Laporan Triwulanan, Laporan Semesteran, Laporan Akhir Tahun, CALK,	Dok	6		6	10.814.120									12	10.814.120	Sekretariat	Bappelitbangda	
		4.03.4.03.01.04.02.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, RKA dan DPA	Dok	-		3	9.734.100									3	9.734.100	Sekretariat	Bappelitbangda	
		4.03.4.03.01.04.03.	Peningkatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Promosi Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Kali	1		-	0									1	0	Sekretariat	Bappelitbangda	
			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	a. Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dengan Perda/Perkada	%	100		100	2.257.248.042									100	2.257.248.042			
				b. Persentase usulan kegiatan yang disepakati dalam Musrembang dan pokok-pokok pikiran DPRD yang dijabarkan	%	100		100											100			
				c. Persentase program/kegiatan Renja Perangkat Daerah yang konsisten dan selaras dengan Renstra Peranakat	%	100		100											100			
				d. Persentase program/kegiatan dalam Renja PD yang konsisten dan selaras dengan RKPD	%	100		100											100			
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah RKPD Tahun n yang di tetapkan dengan Perbub	Perbub			1	871.558.399									1	871.558.399	Rendalev	Bappelitbangda	
				Jumlah Perubahan RKPD Tahun n-1 yang ditetapkan dengan Perbub	Perbub			1										1		Rendalev	Bappelitbangda	
				Jumlah Renja Tahun n yang ditetapkan dengan Perbub	Perbub			1										1		Rendalev	Bappelitbangda	
				Jumlah Perubahan Renja Tahun n-1 yang ditetapkan dengan SK Bupati	SK Bupati			1										1		Rendalev	Bappelitbangda	

			Facilitasi Sumber Pendanaan Pembangunan	Jumlah Laporan DAK Fisik	Dok			4	41.343.965							4	41.343.965	Rendalev	Bappelitbangda
				Jumlah Laporan DBHCT	Dok			1								1		Rendalev	Bappelitbangda
				Jumlah Laporan Fasilitas Dana CSR	Dok			1								1		Rendalev	Bappelitbangda
			Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah Laporan SIPD yang terupdate	Dok			1	572.171.247							1	572.171.247	Rendalev	Bappelitbangda
				Jumlah dokumen data spasial yang disusun	Dok			1								1		Rendalev	Bappelitbangda
				Jumlah profil daerah yang disusun	Dok			1								1		Rendalev	Bappelitbangda
			Penyusunan Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Dokumen Evaluasi Trwulanan Yang Disusun	Dok			8	772.174.431							8	772.174.431	Rendalev	Bappelitbangda
				Jumlah dokumen hasil fasilitas TP2D yang disusun	Dok			2								2		Rendalev	Bappelitbangda
			Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase dokumen rencana Perangkat Daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia tahun	%		100	100	404.188.108							100	404.188.108		
			Facilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Jumlah Laporan Fasilitas, Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Pemerintah Yang Disusun :					159.650.465								159.650.465	PPM	Bappelitbangda
				Laporan hasil koordinasi sub bidang pemerintahan	Dok			1								1		PPM	Bappelitbangda
				Dokumen analisis indeks toleransi tahun 2020	Dok			1								1		PPM	Bappelitbangda
				Laporan rencana aksi nasional hak asasi manusia (RAN HAM)	Dok			1								1		PPM	Bappelitbangda
			Facilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas, Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Manusia Yang disusun :					173.174.056								173.174.056	PPM	Bappelitbangda
				a Laporan Hasil Fasilitas dan Koordinasi Perencanaan su bidang Pembangunan Manusia	Dok			1								1		PPM	Bappelitbangda
				Laporan Pelaksanaan Kabupaten/Kota Sehat (KKS)	Dok			1								1		PPM	Bappelitbangda

	Terwujudnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang			Persentase Dokumen Perencanaan yang telah memenuhi standar	%	100	100		100		80		81		82		83		83				
				Persentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran RENSTRA ≥ 80%	%	n/a	100		100		80		81		82		83		83				
URUSAN PERENCANAAN											6.442.081.399		6.978.697.685		7.300.625.419		7.621.566.844		28.342.971.347				
	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	%						100	4.240.514.916	100	4.567.935.972	100	4.825.500.884	100	5.037.633.824	100	18.671.585.596				
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu	%						100	22.781.888	100	28.318.712	100	28.318.712	100	28.318.712	100	107.738.024				
	5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dok. Perencanaan PD (Renstra, Renja, KAK, SOP)	Dok						4	3.881.344	4	4.210.792		4.210.792		4.210.792	8	16.513.720	Sekretariat	Bappelitbangda		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah *	Dok										4		4		8					
	5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dok RKA-SKPD	Dok						1	3.801.485	1	5.096.980		5.096.980		5.096.980	2	19.092.425	Sekretariat	Bappelitbangda		
			Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD *	Dok										1		1		2					
	5.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dok. Perubahan RKA-SKPD	Dok						3	2.395.594	1	2.248.985		2.248.985		2.248.985	4	9.142.549	Sekretariat	Bappelitbangda		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD *	Dok										1		1		2					
	5.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dok. DPA- SKPD	Dok						1	3.565.990	1	4.830.990		4.830.990		4.830.990	2	18.058.960	Sekretariat	Bappelitbangda		
			Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD *	Dok										1		1		2					
	5.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dok. DPPA- SKPD	Dok						3	2.950.990	1	3.248.985		3.248.985		3.248.985	4	12.697.945	Sekretariat	Bappelitbangda		
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD *	Dok										1		1		2					
	5.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dok. Evaluasi PD (LPPD, LKPJ, SPIP, SAKIP, RB)	Dok						4	6.186.485	5	8.681.980		8.681.980		8.681.980	9	32.232.425	Sekretariat	Bappelitbangda		

			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lapr							5		5		10					
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Yang Baik dan Tepat Waktu	%					100	3.378.964.731	100	3.417.535.491	100	3.765.671.188	100	3.865.671.188	100	14.427.842.598		
	5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai ASN	ASN					28	3.319.954.429	28	3.401.864.303		3.750.000.000		3.850.000.000	56	14.321.818.732	Sekretariat	Bappelitbangda
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN *	ASN								28		30		56				
	5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ATK yang disediakan (Unit)	Unit					38	49.623.786	0	0	0	0	0	0	38	49.623.786	Sekretariat	Bappelitbangda
	5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dok Verifikasi Keuangan	Dok					1	3.085.000	1	5.332.500		5.332.500		5.332.500	2	19.082.500	Sekretariat	Bappelitbangda
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD *	Dok								1		1		2				
	5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dok					1	2.863.620	1	4.452.896		4.452.896		4.452.896	2	16.222.308	Sekretariat	Bappelitbangda
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Lapr								1		1		2				
	5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Bulanan/Trivulanan/Semester an SKPD	Dok					7	3.437.896	2	5.885.792		5.885.792		5.885.792	9	21.095.272	Sekretariat	Bappelitbangda
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Trivulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan/Koordinasi Penyusunan Laporan	Lapr								2		2		4				
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Rasio Pegawai Yang Mengikuti Bimtek dan Jumlah ASN OPD	%					100	0	100	143.343.000	100	143.343.000	100	143.343.000	100	430.029.000		
	5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN Yang Mengikuti Bimtek Implementasi Perundang-undangan	ASN					0	0	10	143.343.000		143.343.000		143.343.000	10	430.029.000	Sekretariat	Bappelitbangda
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan *	Orang								28				28				
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%					100	222.432.235	100	351.519.003	100	351.519.003	100	357.127.300	100	1.282.597.541		
	5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik Yang Disediakan	Unit					16	21.494.179	17	18.378.104		18.378.104		20.000.000	33	78.250.387	Sekretariat	Bappelitbangda

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan *	Paket							17		18		35				
	5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	Unit					25	27.363.600	25	26.035.217	26.035.217		27.000.000	50	106.434.034	Sekretariat	Bappelitbangda
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan *	Paket								25	26			51			
	5.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	Unit					0	0	39	61.188.652	61.188.652		63.000.000	39	185.377.304	Sekretariat	Bappelitbangda
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan *	Paket								39	40			79			
	5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	Unit					6	26.915.456	8	32.849.730	32.849.730		33.000.000	14	125.614.916	Sekretariat	Bappelitbangda
			Jumlah belanja penggandaan yang disediakan	Lembar					10006		10000					20006		Sekretariat	Bappelitbangda
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan *	Paket								9	9			18			
	5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Exp					3	3.200.000	24	3.840.000	3.840.000		3.900.000	27	14.780.000	Sekretariat	Bappelitbangda
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan *	Dok								3	3			6			
	5.01.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Pemenuhan Makanan dan Minuman Kunjungan Tamu	Orang					280	11.200.000	333	11.000.000	11.000.000		12.000.000	613	45.200.000	Sekretariat	Bappelitbangda
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu *	Lapr								1	1			2			
	5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Pemenuhan Makanan dan Minuman Rapat	Orang					0	132.259.000	400	198.227.300	198.227.300		198.227.300	400	726.940.900	Sekretariat	Bappelitbangda
			Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Orang					22		24					46		Sekretariat	Bappelitbangda
			Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Orang					48		28					76		Sekretariat	Bappelitbangda
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD *	Lapr								1	1			2			

		5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	%						100	155.000.000	100	218.770.845	100	128.200.060	100	235.000.000	100	736.970.905		
		5.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas R4 yang disewa	Unit						1	120.000.000	1	120.000.000		120.000.000		150.000.000	2	510.000.000	Sekretariat	Bappelitbangda
				Jumlah pengadaan kendaraan dinas R2	Unit						0		2						2		Sekretariat	Bappelitbangda
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Disediakan *	Unit									1		3			4			
		5.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Unit						3	35.000.000	6	98.770.845		8.200.060		85.000.000	9	226.970.905	Sekretariat	Bappelitbangda
				Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan *	Unit									1		6			7			
		5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran							100	260.222.207	100	258.553.341	100	258.553.341	100	257.606.315	100	1.034.835.204		
		5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim	Surat						1000	17.165.695	1200	5.627.341		5.627.341		5.627.341	2200	34.047.718	Sekretariat	Bappelitbangda
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat *	Lapr									1		1			2			
		5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pemenuhan kebutuhan listrik, air, dan komunikasi	Bulan						12	77.505.312	12	77.976.000		77.976.000		77.976.000	24	311.433.312	Sekretariat	Bappelitbangda
				Jumlah Kebutuhan listrik, air dan komunikasi	Unit								5						5		Sekretariat	Bappelitbangda
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	Lapr									1		1			2			
		5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Bulan						12	165.551.200	12	174.950.000		174.950.000		173.902.974	24	689.354.174	Sekretariat	Bappelitbangda
				Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Macam								5						5		Sekretariat	Bappelitbangda
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan *	Lapr									1		1			2			
		5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Dserah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang dipelihara	%						100	200.974.808	100	149.655.184	100	149.655.184	100	150.426.913	100	650.712.089		

	5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	Unit					4	106.803.070	4	74.608.273		74.608.273		74.608.273	8	330.627.889	Sekretariat	Bappelitbangda
			Jumlah Kendaraan Dinas yang mendapatkan perizinan kendaraan	Unit					24		20						44		Sekretariat	Bappelitbangda
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya *	Unit								24	24				48			
	5.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yg dipelihara	Unit					59	37.501.218	73	31.228.271	31.228.271		32.000.000		132	131.957.760	Sekretariat	Bappelitbangda
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara *	Unit								73	75				148			
	5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara	Unit					2	56.670.520	1	43.818.640	43.818.640		43.818.640		3	188.126.440	Sekretariat	Bappelitbangda
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi *	Unit								1	1				2			
	5.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan	%					100	139,047	100	240,396	100	240,396	100	240,396	100	860,235		
	5.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen SKM	Dok					1	139,047	1	240,396	240,396		240,396		2	860,235	Sekretariat	Bappelitbangda
			Jumlah Promosi pelayanan Pablik Perangkat Daerah	Kali					0		1						1		Sekretariat	Bappelitbangda
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana *	Lapr								1	1				2			
	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	a. Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dengan Perda/Perkada	%					100	1.156.753.075	100	1.184.059.251	100	1.273.256.995	100	1.329.230.407	100	4.943.299.728		
			b. Persentase usulan kegiatan yang disepakati dalam musrenbang dan pokok - pokok pikiran DPRD yang diarahkan	%					95		100		100		100		100			
			c. Persentase program/kegiatan Renja Perangkat Daerah yang konsisten dan selaras dengan Renstra Peranakat	%					100		100		100		100		100			
			d. Persentase program/kegiatan dalam Renja PD yang konsisten dan selaras dengan RKPD	%					100		100		100		100		100			
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dengan Perda/Perkada	%					100	859.718.554	100	850.500.002	100	840.197.746	100	881.230.408	100	3.431.646.709		

			Jumlah Renja Tahun n yang ditetapkan dengan Perbup	Perbup						1									2		Rendalev	Bappelitbangda	
			Jumlah Renstra yang ditetapkan dengan Perbup	Perbup						1										2		Rendalev	Bappelitbangda
			Jumlah RKPJ Tahun n yang ditetapkan dengan Perbup	Perbup						1										2		Rendalev	Bappelitbangda
			Jumlah RPJMD yang ditetapkan dengan Perda	Perda						1										2		Rendalev	Bappelitbangda
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM/RKPD)	Dok									1		1					2			
		5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Updating Data SKPD Kabupaten Sampang	%					100	203.372.726	100	247.611.205	100	247.111.205	100	255.000.000	100	953.095.136				
		5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah SKPD yang melaksanakan updating data	SKPD					5	70.673.086	25	179.785.330		179.285.330		185.000.000	30	614.743.746	Rendalev	Bappelitbangda		
				Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan)	Masukan								47		47				94				
		5.01.02.2.02.02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah SKPD yang memanfaatkan SIPD dalam penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	SKPD					39	125.670.040	25	48.497.475		48.497.475		50.000.000	64	272.664.990	Rendalev	Bappelitbangda		
				Jumlah pelatihan pemanfaatan aplikasi SIPD yang dilaksanakan	Kali					1		1							2		Rendalev	Bappelitbangda	
				Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi *	Orang								47		47				94				
		5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah profil daerah yang disusun	Dok					1	7.029.600	1	19.328.400		19.328.400		20.000.000	2	65.686.400	Rendalev	Bappelitbangda		
				Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan *	Buku								1		1				2				
		5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Laporan Evaluasi Pembangunan Daerah	%					100	93.661.795	100	85.948.044	100	85.948.044	100	88.000.000	100	353.557.883				
		5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah Yang Disusun	Dok					1	78.406.941	1	72.476.304		72.476.304		73.000.000	2	296.359.549	Rendalev	Bappelitbangda		
				Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan *									1		1				2				

	5.01.02.2.03.02	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dok					3	15.254.854	1	13.471.740		13.471.740		15.000.000	4	57.198.334	Rendalev	Bappelitbangda
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah *	Lapr								3		1			4			
	5.01.02.2.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Laporan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	%					0	0	0	0	100	100.000.000	100	105.000.000	100	205.000.000		
	5.01.02.2.04.01	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola *	Dok					0	0	0	0	1	75.000.000	1	80.000.000	2	155.000.000	Rendalev	Bappelitbangda
	5.01.02.2.04.02	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah *	Dok					0	0	0	0	1	25.000.000	1	25.000.000	2	50.000.000	Rendalev	Bappelitbangda
	5.01.02.2.04.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota *	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah	Dok					0	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000		
	5.01.03.2.01	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	a. Persentase dokumen rencana Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan	%					100	1.044.813.408	100	1.226.702.462	100	1.201.867.540	100	1.254.702.613	100	4.728.086.023		
			b. Persentase dokumen rencana Perangkat Daerah lingkup bidang Perencanaan, SDA, Infrastruktur dan	%					100		100		100		100		100			
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dok PD Yang Berkualitas Bidang Pembangunan Manusia	Dok					21	310.443.736	21	476.871.065	21	464.204.783	21	478.705.687	21	1.730.225.271		
	5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang disusun	Dok					1	117.735.944	1	137.238.069		130.000.000		130.705.687	2	515.679.700	PPM	Bappelitbangda
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) *									1		1			2			
	5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil fasilitas/asistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dok					1	30.003.795	1	35.898.410		32.000.000		35.000.000	2	132.902.205	PPM	Bappelitbangda
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Rerja Bidang Pemerintahan	PD									21		21		42			
	5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Dok					1	14.689.352							1	14.689.352	PPM	Bappelitbangda
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Lapr													0			
	5.01.03.2.01.04	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Kesejahteraan Rakyat	Dok					1	93.052.671	1	110.204.783		110.204.783		120.000.000	2	93.052.671	PPM	Bappelitbangda

			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) *	Lapr							1		1		2				
	5.01.03.2.01.05	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil fasilitas/asistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan	Dok						1	13.612.700	1	193529803	192.000.000	193.000.000	2	592.142.503	PPM	Bappelitbangda
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Dok						1				1	2				
	5.01.03.2.01.06	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan	Dok						1	21.597.547				2	362.007.113	PPM	Bappelitbangda	
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah												0				
	5.01.03.2.01.07	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah laporan Koordinasi pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan	Dok						1	19.751.727				1	19.751.727	PPM	Bappelitbangda	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RP/JMD pada Bidang Pembangunan Manusia *	PD											0				
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen PD Yang Berkualitas Bidang Perekonomian dan SDA	Dok						5	210.032.257	5	271.999.837	5	268.665.831	5	307.000.000	5	1.057.697.925
	5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dok						1	34.108.371		123.699.137	120.000.000	120.000.000	1	397.807.508	Ekspraswil	Bappelitbangda
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya	Dok									1	1	2				
	5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Dok						1	0	1	7.056.250	7.421.381	8.000.000	2	22.477.631	Ekspraswil	Bappelitbangda
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	PD									3	3	6				
	5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dok						1	1.797.325	0	0	0	0	1	1.797.325	Ekspraswil	Bappelitbangda
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang	PD									0	0	0				
	5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Dokumen hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dok						1	55.400.000	0	0	0	0	1	55.400.000	Ekspraswil	Bappelitbangda
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RP/JMD pada Bidang Perekonomian *	Lapr									0	0	0				

	5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dok					1	40.456.736	1	55.424.450		55.424.450		65.000.000	2	216.305.636	Ekspraswil	Bappelitbangda
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya	Dok								1		1			2			
	5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Dok					1	0	1	6.545.000		6.545.000		34.000.000	2	47.090.000	Ekspraswil	Bappelitbangda
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA *	PD								2		2			4			
	5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Dokumen hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dok					1	73.769.825	1	79.275.000		79.275.000		80.000.000	2	312.319.825	Ekspraswil	Bappelitbangda
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang	PD								2		2			4			
	5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Dokumen hasil Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dok					1	4.500.000	0	0		0		0	1	4.500.000	Ekspraswil	Bappelitbangda
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPMD pada Bidang SDA *	Lapr								0		0		0				
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen PD Yang Berkualitas Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Dok					5	524.337.415	5	477.831.560	5	468.996.926	5	468.996.926	5	1.940.162.827		
	5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	Dok					1	71.988.759	1	48.766.284		45.000.000		45.000.000	2	210.755.043	Ekspraswil	Bappelitbangda
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya	Dok								1		1			2			
	5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah lingkup bidang infrastruktur	Dok					1	4.212.325	1	12.455.000		12.455.000		12.455.000	2	41.577.325	Ekspraswil	Bappelitbangda
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur *	PD								2		2			4			
	5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	Dok					1	4.627.500	0	0		0		0	1	4.627.500	Ekspraswil	Bappelitbangda
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang	PD								0		0		0				
	5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	Dok					1	106.650.000		60.275.000		60.275.000		60.275.000	1	287.475.000	Ekspraswil	Bappelitbangda

				Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RP/JMD pada Bidang Infrastruktur *	Lapr							1		1		2			
	5.01.03.2.03.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan	Dok						1	66.060.206	1	43.266.926	43.266.926	43.266.926	2	195.860.984	Ekspraswil	Bappelitbangda
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya	Dok									1	1		2			
	5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dok						1	0	1	19.912.500	18.000.000	18.000.000	2	55.912.500	Ekspraswil	Bappelitbangda
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	PD									3	3		6			
	5.01.03.2.03.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dok						1	1.174.300	0	0	0	0	1	1.174.300	Ekspraswil	Bappelitbangda
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang	PD									0	0		0			
	5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Dok						1	269.624.325	1	293.155.850	290.000.000	290.000.000	2	1.142.780.175	Ekspraswil	Bappelitbangda
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RP/JMD pada Bidang Kewilayahan *	Lapr									1	1		2			
URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											617.997.832		499.999.271	602.736.916	629.233.720		2.349.967.738		
	Terwujudnya Penelitian/Kajian dan Inovasi dalam mendukung Kebijakan Daerah		Persentase Penelitian/Kajian yang mendukung kebijakan Daerah	%	n/a	100		100		16,67		12,50	83,33	83,33		83,33			
			Indeks Inovasi Daerah	Indeks	0	860		2454		65*		70*	75*	80*		80*			
	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Inovasi dan Teknologi yang di implementasikan	%						100	617.997.832	100	499.999.271	100	602.736.916	100	629.233.720	100	2.349.967.738
			Persentase hasil litbang yang di implementasikan	%						100		100		100		100			
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan	%						100	172.905.240		0	0	0		172.905.240		
	5.05.02.2.01.11	Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Dok Facilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Dok						1	172.905.240	0	0	0	0	1	172.905.240	Libang	Bappelitbangda

**BAB VII
KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN**

Bappelitbangda Kabupaten Sampang mendukung pada **misi 4** serta mendukung pada pencapaian sasaran **“Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien”**. Indikator kinerja Bappelitbangda yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 merupakan indikator kinerja yang berpengaruh secara langsung terhadap pebcapaian kinerja tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD tersebut.

Indikator tujuan dan sasaran Renstra Bappelitbangda mengacu pada indikator tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD**

No.	Tujuan/Sasaran /Indikator	Kondisi Awal RPJMD (2018)	Realisasi/Target Kinerja						Kondisi Akhir RPJMD (2024)
			2019 (Realisasi)	2020 (Realisasi)	2021 (Target)	2022 (Target)	2023 (Target)	2024 (Target)	
T.4 Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik									
IT.8	Indeks Reformasi Birokrasi	N/A	56	56,9	60,01	62,01	64,01	70,01	70,01
S.17 Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien									
IS.27	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
IS.28	Nilai SAKIP	64,23 (B)	64,99 (B)	66,13 (B)	70,01 (BB)	72,01 (BB)	74,01 (BB)	80,01 (A)	80,01 (A)

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2022

Tabel 7.2
Keterhubungan Renstra Bappelitbangda dengan P-RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024

SASARAN RPJMD		TUJUAN RENSTRA BAPPELITBANGDA		SASARAN RENSTRA BAPPELITBANGDA		Kondisi Awal (2018)	Realisasi/Target Kinerja						Kondisi Akhir (2024)
URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR	URAIAN	INDIKATOR		2019 (Realisasi)	2020 (Realisasi)	2021 (Target)	2022 (Target)	2023 (Target)	2024 (Target)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi					N/A	56	56,9	60,01	62,01	64,01	70,01	70,01
	Opini BPK					WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Nilai SAKIP					64,23	64,99	66,13	70,01	72,01	74,01	80,01	80,01
						(B)	(B)	(B)	(BB)	(BB)	(BB)	(A)	(A)
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja yang Akuntabel	Nilai Perencanaan Kinerja Daerah			74,5	77,13	78,63	78,97	79,00	80,00	80,00	80,00
			Nilai Pengukuran Kinerja Daerah			63,84	67,16	68,56	69,00	70,00	71,00	72,00	72,00
				Terwujudnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan yang telah memenuhi standar	100	100	100	80	81	82	83	83
					Persentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran Renstra >80 %	n/a	100	100	80	81	82	83	83

				Terwujudnya Penelitian/Kajian dan Inovasi dalam mendukung Kebijakan Daerah	Persentase Penelitian/Kajian yang mendukung kebijakan Daerah	n/a	100	100	16,67	12,50	8,33	8,33	8,33
					Indeks Inovasi Daerah	0	860	2454	65*	70*	75*	80*	80*

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Sampang, 2022

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Renstra Bappelitbangda Tahun 2019-2024 adalah dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah dan merupakan penjabaran atas P-RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024. Dalam Renstra ini memuat gambaran pelayanan perangkat daerah, permasalahan dan isu-isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelayanan Bappelitbangda pada Renstra periode sebelumnya, secara total rata-rata capaian keseluruhan indikator kinerja pelayanan adalah 99,37 atau sangat baik.

Dari identifikasi permasalahan pelayanan maka dirumuskanlah isu-isu strategis Perubahan Renstra Tahun 2019-2024 yaitu Peningkatan pengendalian dan evaluasi atas target-target kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan, peningkatan koordinasi perencanaan dan pengendalian dimasing-masing lingkup Bidang Bappelitbangda, Peningkatan jumlah dan kapasitas SDM Bappelitbangda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan.

Perubahan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Sampang disusun berdasarkan tahapan dan tata cara penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis telah dilaksanakan sesuai tahapan penyusunan serta verifikasi untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra telah selaras dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024.

Dengan selesainya penyusunan, Perubahan Rencana Strategis ini, dipergunakan untuk:

1. Pedoman bagi seluruh unit kerja Bappelitbangda Kabupaten Sampang dalam melaksanakan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Perubahan Rencana Strategis;
2. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perangkat daerah tahunan; dan
3. Pedoman dan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja.

Apabila dikemudian hari Perubahan Rencana Strategis ini terdapat ketidaksesuaian akibat perkembangan baik dari internal maupun eksternal, maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA BAPPELITBANGDA KABUPATEN SAMPANG



IP. H. UMI HANIK LAILA, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19661202 199303 2 004

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

**INDIKATOR KINERJA PADA PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tujuan Renstra Perangkat Daerah Mengacu pada : https://bit.ly/sasaranRanwalprpimd_spg21										
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja yang Akuntabel	Nilai Perencanaan Kinerja Daerah	Terwujudnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan yang telah memenuhi standar	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dengan Perda/Perkada	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Dok. Perencanaan Yang Tersusun	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	
		Nilai Pengukuran Kinerja Daerah		Persentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran RENSTRA \geq 80%		Persentase usulan kegiatan yang disepakati dalam musrenbang dan pokok - pokok pikiran DPRD yang dijabarkan ke dalam RKPD			Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	
						Persentase program/kegiatan Renja Perangkat Daerah yang konsisten dan selaras dengan Renstra Perangkat Daerah			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	
						Persentase program/kegiatan dalam Renja PD yang konsisten dan selaras dengan RKPD			Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	
									Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	
							Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Updating Data SKPD Kab. Sampang	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	
									Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	
									Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	
							Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Lapr Evaluasi Pembangunan Daerah	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	
									Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
							Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Persentase Laporan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola *	

									Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah *	
									Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
					Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Berkualitas lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Yang difasilitasi	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dok PD Yang Berkualitas Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
									Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	
									Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
									Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	
									Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
									Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	
									Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	

						Persentase dokumen rencana Perangkat Daerah lingkup bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan yang difasilitasi	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dok PD Yang Berkualitas Bidang Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
									Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	
									Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	
									Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Perekonomian	
									Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
									Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	
									Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	
									Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang SDA	
							Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dok PD Yang Berkualitas Bidang Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
									Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	

										Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	
										Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	
										Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
										Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Wilayah	
										Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Wilayah	
										Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Wilayah	
			Terwujudnya Penelitian/Kajian dan Inovasi dalam mendukung Kebijakan Daerah	Persentase Penelitian/Kajian yang mendukung kebijakan Daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase Inovasi dan Teknologi yang di implemtasikan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil Kelitbangan Bidang Pemerintahan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa		
				Indeks Inovasi Daerah		Persentase hasil litbang yang di implementasikan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		
									Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja		
							Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		

									Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman		
							Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Inovasi dan Teknologi yang diterapkan	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi		
									Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Pelayanan Pemerintah Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Lapr Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
										Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
										Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
										Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	
										Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
										Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
							Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan keuangan yang baik dan tepat waktu	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		
										Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
							Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		

							Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
									Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
									Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
									Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang Disediakan	
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
									Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
							Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Disediakan	
									Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
							Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
							Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang dipelihara	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizannya	
									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
									Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
							Kegiatan Penataan Organisasi	Persentase pelayanan publik yang dilaksanakan	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	

Cell: K20

Comment: apakah ini tidak sebaiknya : Jumlah laporan hasil koordinasi ... yang disusun

-Rendalev Bappeda Sampang

Targetnya brapa?

-nisky qarir agustina

LAMPIRAN 2

REVIEW CASCADING TAHUN 2022
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SAMPANG

INDIKATOR RPJMD					
VISI	MISI	Tujuan		Sasaran	
		Uraian	Indikator	Uraian	Indikator
Sampang Hebat Bermartabat	Memperkuat tata kelola pemerintahan Daerah dan desa yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada pelayanan publik	Terselenggaranya reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan dan desa yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien	Opini BPK Hasil Evaluasi Sakip

CASCADNG (SAMPAI LEVEL RENSTRA)										Ket
Tujuan		Sasaran		Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja yang Akuntabel	Nilai Perencanaan Kinerja Daerah Nilai Pengukuran Kinerja Daerah	Terwujudnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang berkualitas	Persentase Dokumen Perencanaan yang telah memenuhi standar Persentase Capaian Indikator Kinerja Sasaran RENSTRA ≥ 80%	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan dengan Perda/Perkada Persentase usulan kegiatan yang disepakati dalam musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD yang dijabarkan ke dalam RKPD Persentase program/kegiatan Renja Perangkat Daerah yang konsisten dan selaras dengan Renstra Perangkat Daerah Persentase program/kegiatan dalam Renja PD yang konsisten dan selaras dengan RKPD	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Dok. Perencanaan Yang Tersusun	Pelaksanaan Konsultasi Publik Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	

CASCADNG (SAMPAI LEVEL RENSTRA)										
Tujuan		Sasaran		Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		Ket
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	
						<p>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</p>	<p>Persentase Updating Data SKPD Kab. Sampang</p> <p>Persentase Lapr Evaluasi Pembangunan Daerah</p> <p>Persentase Laporan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah</p>	<p>Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD</p> <p>Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota</p> <p>Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</p> <p>Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</p>	<p>Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)</p> <p>Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi</p> <p>Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan</p> <p>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan</p> <p>Jumlah Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola *</p> <p>Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah *</p> <p>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</p>	

CASCADNG (SAMPAI LEVEL RENSTRA)										Ket
Tujuan		Sasaran		Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Persentase dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Berkualitas lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Yang difasilitasi	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dok PD Yang Berkualitas Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
								Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	
								Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
								Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	
								Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
								Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	
								Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	
					Persentase dokumen rencana Perangkat Daerah lingkup bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Wilayah yang difasilitasi	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dok PD Yang Berkualitas Bidang Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
								Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	

CASCADNG (SAMPAI LEVEL RENSTRA)										Ket
Tujuan		Sasaran		Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	
								<p>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian</p> <p>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian</p> <p>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</p> <p>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA</p> <p>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA</p>	<p>Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian</p> <p>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJ/RPJMD pada Bidang Perekonomian</p> <p>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA</p> <p>Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA</p> <p>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJ/RPJMD pada Bidang SDA</p>	
						Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dok PD Yang Berkualitas Bidang Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	<p>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</p>	<p>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur</p>	

CASCADNG (SAMPAI LEVEL RENSTRA)										Ket
Tujuan		Sasaran		Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	
								<p>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur</p> <p>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur</p> <p>Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan</p> <p>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan</p> <p>Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan</p>	<p>Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur</p> <p>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur</p> <p>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</p> <p>Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan</p> <p>Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan</p> <p>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan</p>	
		<p>Terwujudnya Penelitian/Kajian dan Inovasi dalam mendukung Kebijakan Daerah</p>	<p>Persentase Penelitian/Kajian yang mendukung kebijakan Daerah</p> <p>Indeks Inovasi Daerah</p>	<p>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</p>	<p>Persentase Inovasi dan Teknologi yang di implementasikan</p> <p>Persentase hasil litbang yang di implementasikan</p>	<p>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</p> <p>Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan</p>	<p>Persentase hasil Kelitbang Bidang Pemerintahan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan</p> <p>Persentase hasil Kelitbang Bidang Sosial dan Kependudukan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan</p>	<p>Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa</p> <p>Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan</p>	<p>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa</p> <p>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan</p>	

CASCADNG (SAMPAI LEVEL RENSTRA)										Ket
Tujuan		Sasaran		Program		Kegiatan		Sub Kegiatan		
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	
								Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	
						Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	
								Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
						Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Inovasi dan Teknologi yang diterapkan	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
								Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	